

**ANALISIS KONTRIBUSI LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA
BANDAR LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh

Elvan Suhendra

NPM : 1551010174



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS AGAMA NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M

**ANALISIS KONTRIBUSI LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA
BANDAR LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

ELVAN SUHENDRA

NPM: 1551010174

Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.Ak

Pembimbing II : M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS AGAMA NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2019 M

ABSTRAK

Pemerintah daerah saat ini diharuskan mampu mandiri dalam menangani segala urusan pendanaan, baik untuk pembangunan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya suatu pembiayaan yang digunakan untuk penyelenggaraan otonomi daerah maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan menggali sumber PAD yang baru. Salah satu sumber PAD berasal dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan yang dimana pendapatan sektor ini berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun sumber ini dalam beberapa tahun belum mampu memberikan kontribusi yang besar masih jauh tertinggal dari sumber lain, meskipun begitu nilai penerimaan sektor ini masih memiliki potensi yang besar hal ini dapat dilihat dari nilai penerimaan laba pertahunnya yang mengalami peningkatan. Dengan potensi yang dimilikinya ini pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan sektor pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ini agar PAD dapat meningkat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi laba badan usaha milik daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung ? dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi islam? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi laba badan usaha milik daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung dan Untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi islam. Penelitian ini jenis penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data mentah yang telah ada dan dikumpulkan lalu selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan, sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMD yang ada di Kota Bandar Lampung masih belum berkontribusi secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari penerimaan setiap tahunnya yang masih jauh tertinggal dari sumber penerimaan pendapatan asli daerah lainnya. Sedangkan BUMD di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya sesuai perspektif ekonomi islam, hal ini dapat dilihat dari salah satu penerimaan kontribusi BUMD berasal dari perbankan yang dimana perbankan masih menerapkan bunga yang jelas dilarang oleh ajaran islam namun begitu ajaran islam sudah mulai diterapkan hal ini dapat dilihat dari pengelolaan. Pemerintah dalam pengelolaan BUMD telah menerapkan sifat efisien dan tidak menerapkan sifat boros, selain itu pemerintah juga telah menerapkan pengawasan dalam hal pengelolaan limbah agar limbah dari perusahaan tidak merusak lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Pengelolaan, Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan Asli Daerah



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Leikol. H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS KONTRIBUSI LABA BADAN USAHA
MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG
MENURUT PERSPEKTIF ISLAM (Studi pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)**

Nama Mahasiswa : **Elvan Suhendra**

NPM : **1551010174**

Program Studi : **Ekonomi Syari'ah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Any Eliza, S.E., M.Ak
NIP.198308152006042004


M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy
NIP. 198605172015031005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Madnasir, S.E., M.S.I
NIP.197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS KONTRIBUSI LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF ISLAM** (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) disusun oleh **Elvan Suhendra, NPM: 1551010174** Jurusan Ekonomi Syaria'h, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari kamis tanggal 05 September 2019.

TIM MUNAQSAH

Ketua Sidang : Madnasir, S.E., M.S.I

Sekretaris : Dedi Satriawan, M.Pd

Penguji I : Femei Purnama Sari, S.E., M.Si

Penguji II : Any Eliza, S.E., M.Ak

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008122003121001

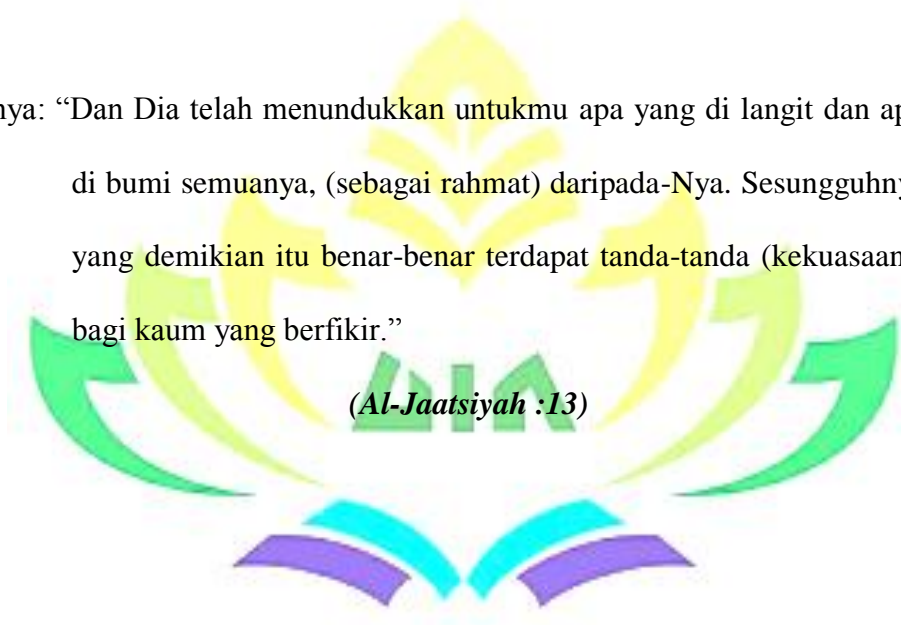
MOTTO

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَّآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”

(Al-Jaatsiyah :13)



PERSEMBAHAN

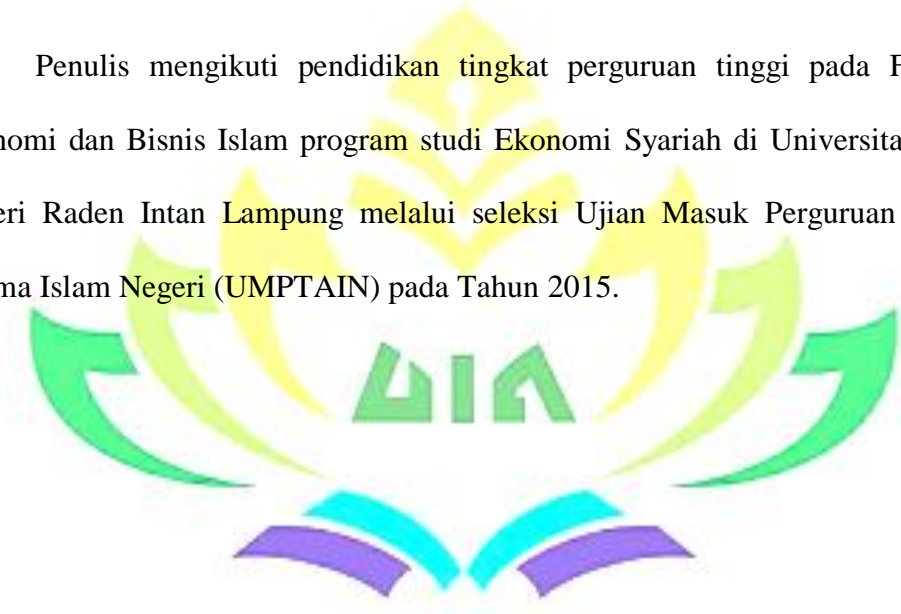
Alhamdulillah dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk saya dalam menyusun skripsi ini. Dalam rentang waktu menuntut ilmu tercipta sebuah karya sederhana yang dimana merupakan awal dari sebuah perjalanan yang sangat panjang dalam menapaki jalan kehidupan yang sangat terjal, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan kerendahan hati, karya yang sangat sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, teruntuk Ibuku Rusma Wati dan Ayahku Taslim Aidi tercinta, terimakasih karena telah menjadi motivator terbesar dalam hidupku yang selalu mendo'akan dan menyayangiku tanpa syarat sehingga atas pengorbanan dan kesabaran kalian mengantarku sampai titik ini. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan di dunia dan akhirat.
2. Kedua kakakku Eka Saputra dan Angga Viktorades dan adikku Perdi Iskandar dan tidak lupa juga untuk seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta menantikan keberhasilanku.
3. Almamater, teman-teman, serta sahabat-sahabat Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Elvan Suhendra, dilahirkan di Kotabumi, Pada tanggal 28 April 1996. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Taslim Aidi dan Ibu Rusma Wati. Pendidikan dimulai dari SD N 4 Tanjung Aman Kotabumi dan selesai pada tahun 2008, lalu melanjutkan studi ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP N 1 Kotabumi dan selesai pada tahun 2011, setelah itu penulis melanjutkan studi ke jenjang sekolah menengah atas di SMA N 4 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2014.

Penulis mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UMPTAIN) pada Tahun 2015.



KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Dzat Yang Maha Agung yaitu Allah SWT yang telah memberikan segala karunia dan nikmat-Nya, kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KONTRIBUSI LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)”**. Sebagai syarat akhir untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shalawat teriring salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan umat Islam, baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan akhlak yang mulia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang

telah membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 diJurusan Ekonomi Syariah dengan baik dan lancar.

3. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak selaku pembimbing I dan Bapak M.Kurniawan, S.E., M.E.Sy selaku pembimbing II yang membantu meluangkan waktu dan dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Ibu Dosen dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
5. Bapak Drs. Zubaidi Thoib,MM selaku pemimpin tingkat satu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, dan segenap karyawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman angkatan 2015 khususnya kelas F program studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Ter-tai Squad (Adinda Zafira Ahadis,, Angga Khalisma Akbar, Agus Setia Pratama, Arif Hidayat, Atik Mulyani, Hamsiah,

Ilyas Bangun Yuda, Iqbal Nibros Qolbi , Nike Yusnia, Rina Trisaputri, Saputri Angraini, Reza, Siti Khotimah, Shouful Wizan, Lamtiur Mayogi R Pasaribu.) Terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama ini.

8. Yuliani Muslim, Sakti Mandra Guna, Misbahul Hadi P Siregar, Zaid Fadhlilah terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama ini.
9. Keluarga besar Gerakan Lampung Peduli Sesama (GLPS) atas doanya dan motivasinya selama ini.

Semoga kebaikan dan jasa dari Bapak, Ibu, dan saudara/I sekalian menjadi amal ibadah dan di ridhoi oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kelemahan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2019

Penulis

Elvan Suhendra

1551010174

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus penelitian	15
E. Rumusan Masalah	15
F. Tujuan Penelitian	16
G. Manfaat Penelitian	16

H. Metode Penelitian	17
----------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. Pengertian BUMD	23
2. Sumber Modal BUMD	24
3. Bentuk-Bentuk BUMD	25
4. Unsur-unsur pengelolaan BUMD	27
5. Tujuan pendirian BUMD.....	27
6. Perbedaan BUMD dan BUMN.....	29
7. Laba BUMD	29
8. Optimalisasi Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	30

B. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	34
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	35
3. Potensi Pendapatan Asli Daerah.....	37
4. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	37
5. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	40

C. Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam.....48

D. Tinjauan Pustaka54

E. Kerangka Pemiikiran.....56

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	
1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	58
2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung	59
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.....	60
4. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	61
B. Kebijakan pemerintah dalam laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.	77

BAB IV ANALISIS DATA

A. Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung	81
B. Kebijakan Pemerintah dalam laba Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	10

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung 2012 - 2017.....	7
Tabel 2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 2012 – 2017	9
Tabel 3	Perbedaan Badan Usaha Milik Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara.....	29
Tabel 4	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Bandar Lampung tahun 2012-2018	78
Tabel 5	Laporan Tahunan Laba BUMD di Kota Bandar Lampung tahun 2012-2018.....	82
Tabel 6	Persentase Kontribusi Laba BUMD yang ada di Kota Bandar Lampung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2018	93
Tabel 7	Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2018.....	97
Tabel 8	Grafik Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 2012-2018	99



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	57
Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Laporan Tahunan Badan Usaha Milik Daerah

Lampiran 3 Surat Persetujuan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Pra Riset

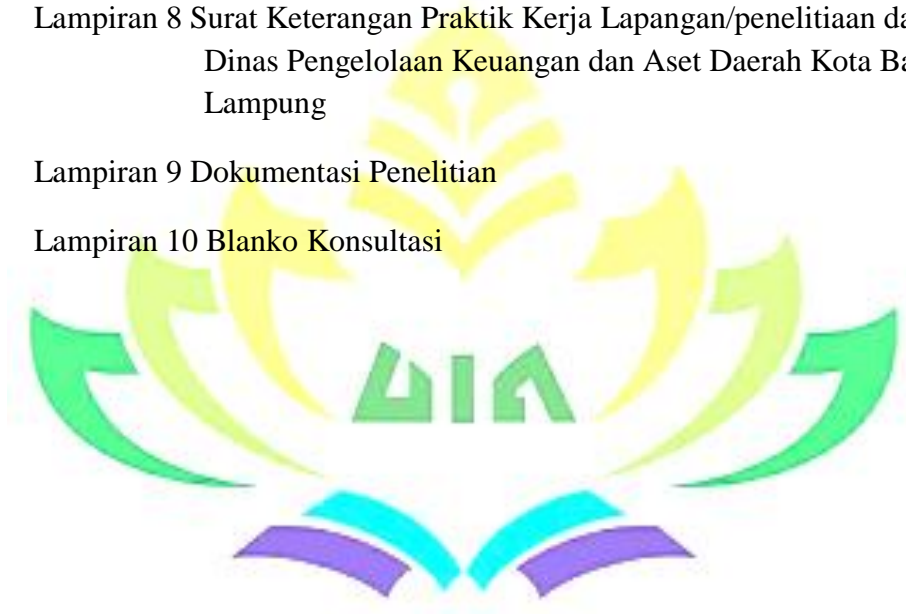
Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian/Survei dari Kesbangpol Kota Bandar
Lampung

Lampiran 8 Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan/penelitian dari
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar
Lampung

Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 10 Blanko Konsultasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembahasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah Adapun skripsi ini berjudul **“ANALISIS KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. **Pengaruh** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya yang timbul dari sesuatu (benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹
2. **Kontribusi** menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah suatu uang iuran pada perkumpulan atau sumbangan.²
3. **BUMD** adalah perusahaan yang didirikan atau dimiliki oleh pemerintah daerah.³

¹Kementrian Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2015), h.147.

² Yadiano, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung : M2S, 2001), h. 282.

³Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

4. **Pendapatan Asli Daerah** adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain.⁴

5. **Ekonomi Islam** adalah suatu cabang Ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami.⁵

Secara keseluruhan penjelasan dari judul penelitian ini “**ANALISIS KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**” adalah menganalisis bagaimana kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung yang dipandang dalam perspektif ekonomi islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun dipilihnya judul dalam penelitian ini, yaitu dengan alasan sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Provinsi Lampung Khususnya Kota Bandar Lampung sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang

⁴ Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), h. 101.

⁵ P3EI. *Ekonomi Islam*.(jakarta: Rajawali Pers. 2011).h. 17

sah. Besarnya sumber potensi penerimaan daerah ini diharapkan dapat membantu pembiayaan pembangunan daerah agar dapat menjadi mandiri. Akan tetapi, kenyataannya pendapatan daerah ini masih belum maksimal disemua sektornya, hal ini dapat dilihat dari sektor hasil kekayaan yang dipisahkan memiliki nilai yang jauh tertinggal dari sektor lainnya. Meskipun tertinggal jauh nilai penerimaan dari sektor ini masih memiliki potensi yang besar.

Seharusnya pendapatan daerah yang berasal dari Hasil Kekayaan Yang Di Pisahkan ini dapat meningkatkan pendapatan kota Bandar Lampung melalui laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), jika BUMD berjalan dengan lancar dan baik maka akan memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga keberadaannya harus dimanfaatkan secara baik dengan cara meningkatkan dalam hal pengelolaannya. Sehingga hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai seberapa besar kontribusi Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandar Lampung.

2. Alasan subjektif

Memberikan pengetahuan khususnya bagi penulis maupun secara umum bagi pembaca tentang kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung menurut Perspektif Ekonomi Islam dan juga dari aspek yang penulis bahas, permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk dibahas atau diteliti. Disamping itu pula data dari penelitian yang penulis lakukan

ini dapat diperoleh melalui beberapa lembaga atau instansi yang terkait dan juga penelitian yang dilakukan oleh penulis ada relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari dari Fakultas Ekonomi.

C. Latar belakang

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, lalu direvisi kembali dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Indonesia mulai menerapkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yang semulanya bersifat sentralisasi, sekarang berubah menjadi otonomi (desentralisasi) dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengurus pemerintahan dan mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing.⁶

Otonomi daerah menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Menurut pandangan Mudrajat Kuncoro salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Sistem desentralisasi tetap diterapkan untuk memudahkan

⁶ Sjafrizal, *ekonomi wilayah dan perkotaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.272.

⁷ Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, Op.Cit., h.1.

koordinasi kekuasaan dan Pemerintah, disamping untuk lebih mengakomodasi keberagaman wilayah Indonesia.⁸

Untuk menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggara-nya otonomi daerah yang semakin baik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.⁹

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Nurcholis, Pendapatan Asli Daerah

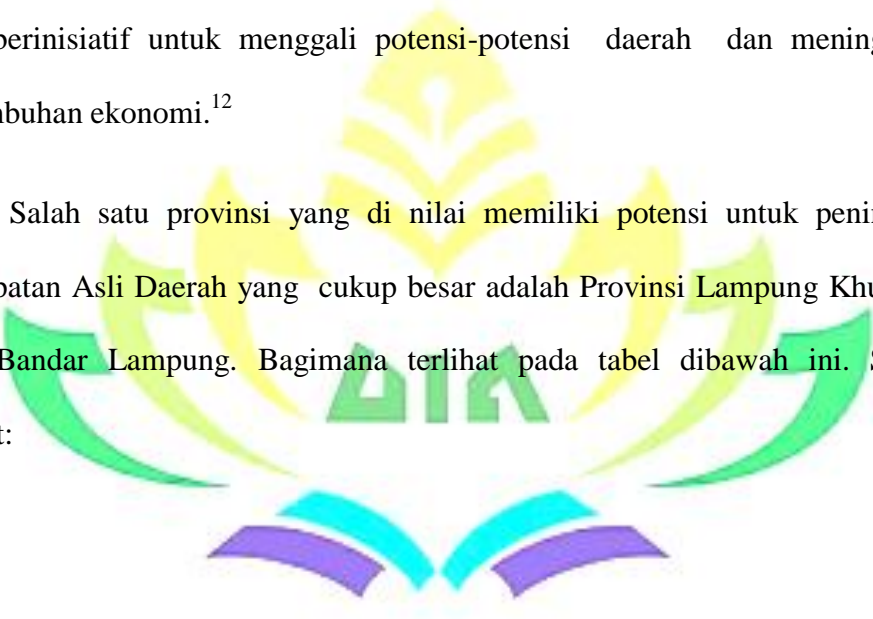
⁸ Tengku Ahmad Yani, *"Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No. 56, tahun 2012, h. 124

⁹ Abdul Halim, *Manajemen keuangan daerah*, (Yogyakarta: Bunga Rampat, 2014), h. 91

adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah.¹⁰

Isyarat bahwa Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan Otonomi Daerah.¹¹ Karena jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹²

Salah satu provinsi yang di nilai memiliki potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar adalah Provinsi Lampung Khususnya Kota Bandar Lampung. Bagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. Sebagai berikut:



¹⁰ Abid Muhtarom, "Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan periode tahun 2010-2015" Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. XIII, No.1, tahun 2015, h.659

¹¹ Bayu Pratama Putra, "Analisis Kontribusi Laba Perusahaan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.Tanjung Pinang Kep. Riau, 2016, h.3

¹² Andri Devita,Arman Delis, dan Junaidi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi" Jurnal Perpektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol.2, No.2 tahun2014, h.2338-4603

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung 2012-2017

(000 Rp)

Kabupaten dan Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lampung Barat	25.278.217.612,44	33.829.813.861,91	40.800.358.954,33	46.434.649.525,00	49.078.912.000,00	82.125.266.370,00
Tanggamus	18.672.612.000,00	22.017.450.000,00	22.488.679.780,00	21.979.172.080,00	23.712.889.211,97	56.177.617.870,00
Lampung Selatan	80.459.249.970,00	100.050.587.688,17	130.597.526.740,00	161.645.901.760,00	184.063.778.381,77	206.061.231.200,00
Lampung Timur	49.824.005.681,77	40.651.198.151,11	83.131.971.561,89	84.496.936.514,89	94.924.247.670,00	207.235.268.581,22
Lampung Tengah	101.060.354.431,83	81.780.246.000,00	108.180.987.627,50	116.343.189.033,00	137.871.550.590,00	147.048.201.161,01
Lampung Utara	21.351.361.720,00	40.850.366.455,56	80.918.349.924,25	93.239.503.923,12	98.607.164.912,55	103.970.703.710,00
Way Kanan	10.148.122.522,00	24.831.167.999,00	45.811.422.790,00	47.882.003.792,00	44.346.945.471,71	49.551.283.410,00
Tulang Bawang	23.152.050.643,64	36.242.825.990,00	24.444.892.152,12	34.088.549.871,11	49.551.283.411,07	40.931.506.764,00
Pesawaran	25.710.883.650,00	25.933.059.045,97	36.482.436.462,66	37.060.018.722,00	41.956.848.580,00	50.150.346.621,43
Pringsewu	29.090.633.000,00	30.421.121.000,00	63.339.740.420,00	61.765.136.000,00	68.157.777.774,85	73.405.027.121,06
Mesuji	8.269.164.520,00	10.021.180.000,00	20.901.990.034,00	18.713.301.111,01	27.783.046.539,74	22.114.016.973,00
Tulang Bawang Barat	5.840.255.798,00	10.345.128.350,00	15.436.104.692,71	16.452.748.571,57	20.882.974.142,21	97.387.117.999,48
Pesisir Barat	-	-	10.373.342.753,10	11.597.895.333,00	20.710.862.000,00	42.895.150.223,56
Bandar Lampung	300.696.062.096,33	360.698.350.030,13	394.646.889.455,86	397.547.326.194,00	483.379.398.037,47	613.208.672.046,62
Metro	48.377.824.861,12	59.224.528.019,33	97.307.834.647,00	127.586.002.961,00	113.989.941.271,89	154.652.520.650,00

Sumber : Badan Pusat Statistik



Dari data di atas dapat terlihat bahwa Kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung yang mendapatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah tertinggi adalah Kota Bandar Lampung. Besarnya suatu potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki Kota Bandar Lampung terlihat dari sudah mulai berkembangnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Terlihat pula bahwa daerah perkotaan diperkirakan akan mempunyai potensi penerimaan PAD yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten karena jumlah hotel dan restoran, bangunan serta kendaraan bermotor secara relative akan lebih banyak terdapat pada daerah perkotaan. Demikian pula halnya dengan perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diperkirakan akan lebih banyak memilih lokasi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.¹³

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kota Bandar Lampung lebih didominasi oleh sektor pajak daerah yang dimana memiliki perolehan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Selain memiliki sektor unggulan dalam penunjang Pendapatan Asli Daerah, Kota Bandar Lampung juga memiliki sektor yang tertinggal dari sektor lainnya yaitu sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dimana memiliki perolehan jauh lebih kecil dari yang lainnya. Terlihat seperti tabel dibawah ini:

¹³ Sjafrizal, *Op.Cit*, 275

Tabel 2**Realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Bandar Lampung tahun 2012-2017**

(000 Rp)

Tahun	Pajak daerah	Retribusi daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	lainlain pendapatan daerah yang sah	Total
2012	183.436.575.298,23 (61%)	70.252.030.151,00 (24%)	6.862.738.923,00 (2%)	40.144.717.723,99 (13%)	300.696.062.096,22
2013	242.651.752.330,00 (67%)	50.651.293.800,00 (15%)	8.237.246.269,54 (2%)	59.158.057.630,59 (16%)	360.698.350.030,13
2014	246.167.925.219,96 (62%)	45.920.496.941,00 (12%)	13.206.503.301,24 (3%)	89.351.963.993,66 (23%)	394.646.889.455,86
2015	258.454.662.000,00 (65%)	46.682.837.194,00 (12%)	11.249.897.883,27 (3%)	81.159.929.116,73 (20%)	397.547.326.194,00
2016	324.667.322.500,00 (67%)	49.653.325.823,33 (11%)	10.886.472.354,14 (2%)	98.172.277.360,00 (20%)	483.379.398.037,47
2017	373.764.303.000,00 (61%)	28.256.993.000,00 (5%)	13.461.922.795,62 (2%)	197.725.453.251,00 (32%)	613.208.672.046,62

Sumber :Badan Pusat Statistik

Dari data di atas dapat terlihat bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah kota Bandar Lampung setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah Pendapatan Asli Daerah kota Bandar Lampung sebesar 300.696.062.096,22. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 360.698.350.030,13. Pada tahun 2014 sebesar 394.646.889.457,86. Pada tahun 2015 sebesar 397.547.326.000,00. Pada tahun 2016 sebesar 483.379.398.037,47. Dan pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah kota Bandar Lampung masih terus mengalami peningkatan yang dimana sebesar 613.208.672.046,62.

Data di atas juga telah terlihat bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah kota Bandar Lampung yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan meskipun peningkatannya masih jauh tertinggal dari sumber pendapatan asli daerah yang lainnya. Meskipun tertinggal dengan yang lain namun masih memiliki potensi peningkatan pendapatan yang

dapat jauh lebih besar yang dihasilkan oleh sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini, diharapkan sumber pendapatan ini dapat dimaksimalkan potensinya agar penerimaan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung dapat lebih besar.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperoleh sumber dana di antaranya berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD). Selain untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, keberadaan perusahaan daerah atau BUMD menurut Rodi Dohar adalah untuk mencapai profit dalam bidang usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari deviden yang disetorkan ke kas daerah. Deviden yang diperoleh BUMD tersebut akan menjadi pendapatan pemerintah daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah.¹⁴

Di Kota Bandar Lampung terdapat beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdiri, diantaranya yaitu : Bank Lampung, Perusahaan Daerah (PD) BPR bank pasar , PD Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Bandar Lampung dan PDAM (perusahaan daerah air minum way rilau bandar lampung).

¹⁴ Yudho Taruno Muryanto, Djuwityastuti, *"Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance"* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. 3, No. 1 Tahun 2014, h. 125

Bank Lampung pertama kali didirikan di Bandar Lampung dengan nama Bank Pembangunan Daerah Lampung sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Tingkat I Lampung No. 10A/1964 tanggal 1 Agustus 1964 tentang pembentukan Bank Pembangunan Daerah Lampung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. DES.57/7/31-150 tanggal 26 Juli 1965.¹⁵

PD BPR Bank Pasar adalah perusahaan daerah yang melakukan kegiatan ekonomi secara aktif, dengan bergerak dibidang pemberian kredit bagi masyarakat kota Bandar Lampung dan secara tidak langsung, sebagai stimulator bagi lancarnya kegiatan perekonomian masyarakat Kota Bandar Lampung.¹⁶ PD BPRS Kota Bandar Lampung adalah lembaga keuangan perbankan pertama yang berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah Islam.¹⁷

PDAM Way Rilau adalah Perusahaan Daerah yang menghasilkan output publik yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya, dan Pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenangan

¹⁵ “Sejarah Bank Lampung” (Online), tersedia di: <https://banklampung.co.id/profil/sejarah> (23 Februari 2019, pukul : 20:40 WIB)

¹⁶ Ayu Mutia Sari, “Analisis Kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Dalam Memberikan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2001-2006”, (Skripsi Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2007), h.1.

¹⁷ Bank Syariah Bandar Lampung, *Sejarah BPRS Kota Bandar Lampung*, diakses dari banksyariahbandarlampung.co.id pada 18 Desember 2018 pukul 22:25 WIB.

kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Berdasarkan output yang dihasilkan dan tujuan usaha, PDAM Way Rilau cenderung memiliki tujuan usaha yang bermotif sosial.¹⁸

Sejalan dengan itu saat ini pemerintah mulai aktif meningkatkan pendapatan di sektor laba Badan Usaha Milik Daerah. Salah satunya dengan cara menyuntikkan dana kepada Badan Usaha Milik Daerah, menurut Juru Bicara Anggaran DPRD Bandar Lampung Agusman Arief memaparkan, anggaran Rp 121,5 miliar pada pos pembiayaan daerah akan teralokasi untuk penyertaan modal pada sejumlah BUMD. Adapun rincian penyertaan modal itu masing-masing Rp 34,5 miliar untuk PDAM Way Rilau dan Rp 10 miliar untuk Bank Perkreditan Rakyat Pasar kemudian Rp 5 miliar untuk Bank Syariah Bandar Lampung. Sisanya untuk pembayaran utang pokok kepada pihak ketiga, PT SMI sebesar Rp 70 miliar.¹⁹

Adanya BUMD di kota Bandar Lampung ini di harapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dalam hal mengelolanya. Karena jika tiga perusahaan ini dapat dikelola dengan baik maka akan berpotensi untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengoptimalan Laba BUMD pemerintah tetap harus mampu memperhatikan hukum-hukum islam jangan sampai ketidak adilan tercipta karena

¹⁸PDAM Way Rilau, diakses dari www.pdamwayrilau.com, tanggal 18 Desember 2018 pukul 22:40

¹⁹*Lampung.tribunnews.com*, diakses pada tanggal 9 Januari 2019 pukul 13:28

pemerintah ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan ajaran yang dijelaskan dalam Al-Qur'an seperti berikut

نَبِّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَتَوَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.” (Qs. an-Nisaa (4): 58).*²⁰

Menurut Tafsir Al-Muyassar didalam ayat ini amanat artinya setiap yang dibebankan kepada manusia dan mereka diperintahkan melakukannya. Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan hamba-hamba-Nya menunaikan amanat, yakni secara sempurna; tidak dikurangi dan tidak ditunda-tunda. Termasuk ke dalam amanat adalah amanat untuk beribadah (seperti shalat, zakat, puasa dsb), amanat jabatan, harta dan rahasia serta perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Allah. Contoh menunaikan amanat dalam jabatan adalah dengan memenuhi kewajibannya, memenuhi amanat dalam harta adalah dengan menjaganya dan mengembalikan kepada pemiliknya secara utuh dan amanat dalam rahasia adalah dengan menyembunyikannya.²¹

Selain itu isi kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada pemimpin dan orang yang berhak membuat keputusan

²⁰ Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : 2009), h.87

²¹<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>, di akses pada tanggal 24 februari 2019 pukul 21:00

untuk berlaku adil dalam menentukan hukum baik terhadap individu atau kelompok yang berseberangan dengan mereka, karena keadilan mendekatkan pelakunya kepada ketakwaan. Selain itu agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang diberikan amanah itu. Selain ayat diatas terdapat juga penjelasan dalam ayat lain, seperti berikut

نَفَرِيقًا تَأْكُلُوا الْحُكْمَ إِلَىٰ يَهَآؤُتَدُوْا بِٱلْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَٰلَكُمْ تَأْكُلُوْا وَلَا
تَعْلَمُوْنَ وَأَنْتُمْ بِآثِمِ ٱلنَّاسِ أَمْوَٰلِ ۖ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Qs. Al Baqarah(1):188)²²

Dari penjelasan diatas pemerintah diharapkan mampu mengelolanya dan menetapkan kebijakan dengan baik sesuai dengan hukum islam, yang dimana pemerintah tidak hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi tetap mempertimbangkan cara memperolehnya seperti tidak mendzolimi salah satu pihak. Jika hukum islam telah diterapkan dengan benar maka tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya baik itu masyarakat umum maupun badan usaha milik daerah itu sendiri dapat terwujud. Hasil laba BUMD yang dimana sebagai sumber penerimaan harus dapat digunakan untuk tercapainya suatu tujuan pembangunan daerah. Dalam hal pendistribusiannya

²²Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahan, (Bandung:2009), h.28

sumber pendapatan ini harus bersifat adil dan jujur agar merata sehingga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Melihat penjelasan yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang mampu untuk membiayai pembangunan daerah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“ANALISIS KONTRIBUSI LABA BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

D. Fokus penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sektor penerimaan pendapatan asli daerah yang diteliti hanya sektor penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. didalam penelitian ini hanya meneliti kontribusi laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah.

E. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi laba badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi islam?

F. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kontribusi laba badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi islam.

G. Manfaat penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademisi
 - a. Sebagai satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta untuk mengetahui seberapa tingkat tingkat ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menjadi mahasiswa.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana atau referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktisi

- a. Sebagai masukan dan informasi bagi pembuat kebijakan pemerintah daerah kota Bandar Lampung dalam merencanakan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama dalam pengembangan Badan Usaha Milik Daerah.

H. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sering disebut penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan dianalisisnya lebih bersifat kualitatif.²³ Selain itu Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel.²⁴

²³ Sugiyono, *Metode penelitian manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.37

²⁴ *Ibid*, h. 347

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan tempat penelitian.²⁵ Penelitian lapangan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu berkenaan dengan analisis kontribusi laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah di kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi.

b. Sifat penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis adalah penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dengan suatu yang diteliti. Sifat penelitian ini untuk menggambarkan atau mengangkat data sesuai dengan keadaan yang terjadi lapangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardalis, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat, menganalisa kondisi yang ada dan sedang terjadi.²⁶

²⁵Kartini kartono, *pengantar metodologi riset sosial*, (Bandung: Mundur Maju, 2012), h.185

²⁶Rony kountur, *metode penelitian*, (jakarta: Bumi Aksara 2005), h.43

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi menurut Sutrisno Hadi populasi adalah keseluruhan objek penelitian semua individu dan untuk setiap kenyataan yang diperoleh dari sampel hendaknya digeneralisasikan.²⁷ Dalam hal ini, populasi yang menjadi objek penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dan BUMD Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel atau mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.²⁸ Dalam penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu data realisasi PAD dan data realisasi laba BUMD dalam tujuh tahun terakhir yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung yaitu tahun 2012-2018.

²⁷ Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. (Yogyakarta: UGM, 1985), h. 70.

²⁸ Sugiyono, Op.Cit, h. 156

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari obyeknya dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan.²⁹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti ini melalui cara mewawancarai informan yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung agar menjawab rumusan masalah kedua.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, data badan pusat statistik, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.³⁰ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu hasil rekapan pendapatan BUMD Kota Bandar Lampung pada tahun 2012-2018 yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung yang dimana digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama.

4. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

²⁹Suprpto, *Metode Ramalan Kuantitatif*, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya,2010), h.9

³⁰Rony kountur, *Op.cit*, h.42

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder.³¹ Teknik dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yang dimana peneliti mengumpulkan data pendapatan BUMD kota Bandar Lampung pada tahun 2012-2018 di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³² Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yang dimana peneliti mewawancarai narasumber yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

5. Metode penganalisis data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis lah data tersebut dapat

³¹Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, h. 69

³²Moh. Nazir, *metode penelitian*, (Bogor: Graia Indonesia, 2009), h. 193

diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan suatu masalah yang ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini dimana peneliti memiliki dua rumusan masalah. Untuk menjawab rumusan masalah pertama peneliti mengumpulkan data pendapatan BUMD yang ada di Kota Bandar Lampung tahun 2012-2018 lalu data pendapatan tersebut diolah menggunakan sebuah rumus kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi laba BUMD} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Realisasi laba BUMD

Y = Realisasi pendapatan asli daerah

Hasil dari perhitungan yang telah dilakukan maka diperoleh nilai kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung. Nilai tersebut di sajikan dalam bentuk tabel dan grafik sehingga lebih mudah dipahami.

Cara menjawab rumusan masalah kedua peneliti menggunakan metode wawancara dimana peneliti mewawancarai narasumber berasal dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, setelah hasil wawancara telah didapat maka peneliti selanjutnya menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan dan mempunyai makna untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. Pengertian BUMD

Menurut Undang-Undang BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.³³ Sedangkan menurut Yudho Taruno Muryanto di dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Badan Usaha milik Daerah (BUMD) merupakan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD).³⁴ Sedangkan menurut Muzakar Isa didalam jurnalnya menjelaskan bahwa BUMD adalah sebuah perwujudan dari peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah.³⁵

Semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah suatu usaha yang diciptakan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya, hal ini agar daerah tidak tergantung pada pemerintah pusat. Namun pada kenyataannya bahwa BUMD yang ada selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), justru lebih banyak suntikan dana dari pemerintah daerah daripada keuntungan yang di dapat. Kondisi tersebut menjadi beban bagi APBD. Sehingga apa yang

³³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 40

³⁴ Yudho Taruno Muryanto, Djuwityastuti, "Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance", Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1, Tahun 2014, h.126

³⁵ Muzakar Isa, Abu Bakar Akbar, "Pengukuran Efisiensi BUMD: Studi Empirik PDAM di Eks-Karisidenan Surakarta", Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol.16 No.1, Tahun 2012, h. 70

menjadi tujuan berdirinya BUMD adalah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah tidak tercapai.³⁶

Adanya permasalahan seperti ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan keberadaan BUMD di daerahnya, karena BUMD memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian daerah. BUMD diharapkan mampu memainkan peranan sebagai agen pembangunan sekaligus juga sumber penerimaan pemerintah daerah.³⁷ Menurut Budisatrio ada beberapa cara untuk memperbaiki kinerja BUMD, yaitu (1) restrukturisasi kelembagaan, yaitu dengan perampingan organisasi BUMD, (2) penilaian kinerja direksi dengan criteria yang jelas, dan (3) melakukan privatisasi tanpa melakukan penjualan aset.³⁸

2. Sumber Modal BUMD

Menurut undang-undang pemerintahan daerah sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang dimana terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham.³⁹ Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan perda, penyertaan modal daerah ini dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD yang dimana dapat berupa uang dan barang milik daerah. Barang milik daerah yang terkait harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal dengan melakukan penafsiran harga

³⁶ Yudho Taruno Muryanto, Djuwityastuti, Op.Cit, h. 126

³⁷ Muzakar Isa, Abu Bakar Akbar, Op.cit, h. 69

³⁸ *Ibid*, h. 70

³⁹ Undang-Undang RI No.9 Tahun 2015 pasal 332

barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

3. Bentuk-bentuk BUMD

Bentuk BUMD telah dijelaskan dalam undang-undang RI tentang pemerintahan daerah yang dimana BUMD dibagi menjadi dua jenis yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

a. Perusahaan umum daerah

Perusahaan umum daerah dijelaskan dalam undang-undang pasal 334 sampai pasal 338, yang dimana perusahaan umum daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Jika perusahaan umum daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, maka perusahaan umum daerah tersebut harus berubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah.⁴¹

Didalam perusahaan umum daerah terdapat kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.⁴² Laba perusahaan umum daerah ditetapkan oleh wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.⁴³

⁴⁰ Undang-Undang RI No.9 Tahun 2015 Pasal 333

⁴¹ Undang-Undang RI No.9 Tahun 2015 Pasal 334

⁴² Undang-Undang RI No.9 Tahun 2015 Pasal 335

⁴³ Undang-Undang RI No.9 Tahun 2015 Pasal 336

Perusahaan umum daerah dapat dibubarkan yang dimana pembubaran ini harus ditetapkan dengan perda. Lalu kekayaan perusahaan umum daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah.⁴⁴

b. Perusahaan perseroan daerah

Perusahaan perseroan daerah dijelaskan dalam undang-undang pasal 339 sampai pasal 342, yang dimana perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri dari beberapa daerah dan salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas.⁴⁵

Didalam perusahaan perseroan daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris.⁴⁶ Perusahaan perseroan daerah ini dapat dibubarkan dan kekayaan daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan daerah yang menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah. Ketentuan lebih lanjut dalam hal pembubaran perusahaan perseroan daerah diatur dalam peraturan pemerintah.⁴⁷

⁴⁴ Undang-Undang RI No.9 Tahun 2015 Pasal 338

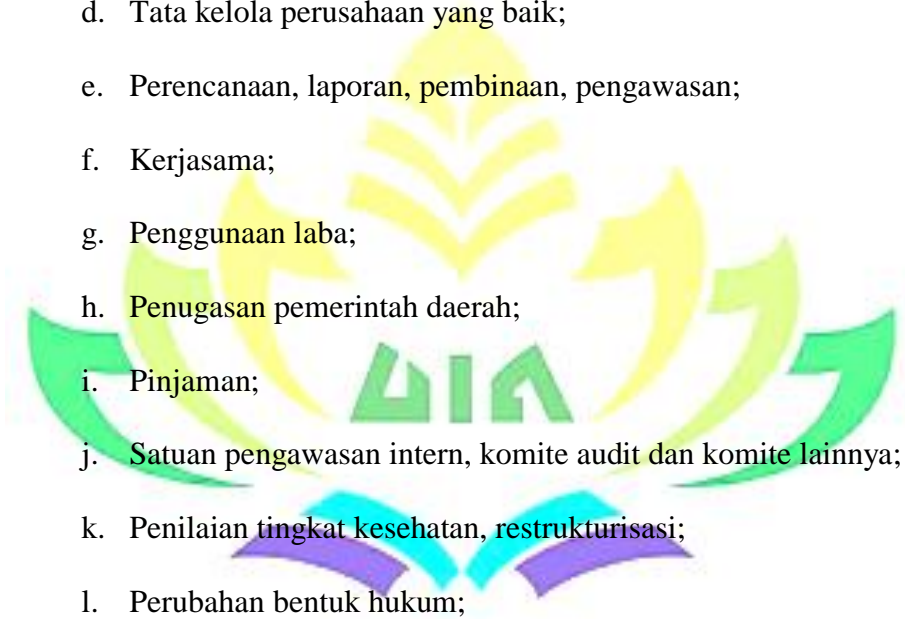
⁴⁵ Undang-Undang RI No.9 Tahun 2015 Pasal 339

⁴⁶ Undang-Undang RI No.9 Tahun 2015 Pasal 340

⁴⁷ Undang-Undang RI No.9 Tahun 2015 Pasal 342

4. Unsur-unsur pengelolaan BUMD

Menurut Undang-Undang pemerintahan daerah ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur seperti berikut :

- 
- a. Tata cara penyertaan modal;
 - b. Organ dan kepegawaian;
 - c. Tata cara evaluasi;
 - d. Tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. Perencanaan, laporan, pembinaan, pengawasan;
 - f. Kerjasama;
 - g. Penggunaan laba;
 - h. Penugasan pemerintah daerah;
 - i. Pinjaman;
 - j. Satuan pengawasan intern, komite audit dan komite lainnya;
 - k. Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi;
 - l. Perubahan bentuk hukum;
 - m. Kepailitan; dan
 - n. Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan.⁴⁸

5. Tujuan pendirian BUMD

Menurut Undang-Undang Pemerintahan daerah tujuan dari pendirian BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan

⁴⁸ Undang-Undang RI No.9 Tahun 2015 pasal 343

perekonomian daerah pada umumnya, Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan tujuan terakhir dari pendirian adalah untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan.⁴⁹

keberadaan perusahaan daerah atau BUMD menurut Rodi Dohar Harahap adalah untuk mencari profit dalam bidang usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari deviden yang disetorkan ke kas daerah. Deviden yang diperoleh dari BUMD tersebut kemudian akan menjadi pendapatan pemerintah daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah. Pembagian konsep BUMD yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan pada masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. Untuk BUMD yang berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial. Sedangkan BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.⁵⁰

⁴⁹ Undang-Undang RI No.9 Tahun 2015 Pasal 331 Ayat 4

⁵⁰ Yudho Taruno Muryanto, djuwityastuti, Op.cit, h. 126

6. Perbedaan BUMD dan BUMN

Tabel 3
Perbedaan Badan Usaha Milik Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara⁵¹

BUMD	BUMN
1. Usaha yang dijalankan BUMD relatif berskala kecil dan menengah.	1. Usaha yang dijalankan BUMN relatif lebih berskala besar dibandingkan dengan usaha BUMD.
2. Aspek hukum pengaturan terkait BUMD tidak secara khusus memberikan arahan dan pedoman dalam pengelolaan sebuah badan usaha yang dimiliki oleh daerah. Aspek hukumnya masih menggunakan dasar peraturan daerah.	2. Aspek hukum BUMN sudah mempunyai payung hukum UU Nomor 19 tahun 2003.
3. BUMD masih tertinggal karena masih banyak BUMD yang belum menerbitkan sahamnya di lantai bursa.	3. BUMN yang berbentuk perseroan lebih maju karena telah menjadi perusahaan publik dengan menerbitkan sahamnya di lantai bursa.

7. Laba Badan Usaha Milik Daerah

Manahan P. Tampubolon menyatakan bahwa suatu laba atau korporasi merupakan hal yang diperoleh dari hasil penjualan dikurangi semua biaya operasional. Sedangkan menurut Soemarsono SR laba adalah hasil selisih antara penerimaan atau pendapatan total dan jumlah seluruh biaya.⁵²

⁵¹*Ibid*

⁵² Bayu Pratama Putra, "Analisis Kontribusi Laba Perusahaan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjung Pinang periode 2010-2015", jurnal Akutansi

Berdasarkan dari kedua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu laba dapat diperoleh dari hasil penjualan setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan.Sedangkan dalam hal laba BUMN/BUMD adalah sesuatu yang diberikan individu atau kelompok yang berbentuk iuran atau dana yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dimana laba tersebut diperoleh dari aktifitas BUMD yang ada di daerah tersebut.

8. Optimalisasi Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dalam perspektif ekonomi islam

Suatu Badan Usaha Milik Negara/Daerah merupakan salah satu sektor yang penting bagi negara atau daerah dalam hal untuk menciptakan pendapatan di wilayahnya.Karena biasanya BUMN/BUMD yang berdiri disuatu wilayah lebih dari satu.Dengan adanya BUMD/BUMN disuatu daerah ini diharapkan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah tersebut.⁵³

Berdasarkan penjelasan Soerjono Soekanto mengartikan kontibusi adalah sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.⁵⁴ Sedangkan T Guritno menjelaskan

⁵³ Veithzal Rivai Zainal, Nurul Huda, Sri Vandayuli Riorini, *Ekonomi Mikro Islam*,(Jakarta: Bumi Aksara,2018), h.528

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 269.

bahwa kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.⁵⁵

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi dalam hal laba BUMN/BUMD adalah sesuatu yang diberikan individu atau kelompok yang berbentuk iuran atau dana yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat tercapai.

Meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap penerimaan PAD perlunya dilakukan upaya peningkatan profesionalitas, efisiensi, profitabilitas, bahkan privatisasi perusahaan daerah. Memang keberadaan pemerintahan bukanlah berdagang untuk mencari laba sitinggi-tingginya, namun memberikan pelayanan publik secara adil, merata, efisien, dan berkualitas.⁵⁶

Perlu diingatkan bahwa penyediaan pelayanan publik yang secara kualitas tidaklah gratis, butuh biaya yang besar. Sementara itu biaya pelayanan publik tidaklah mungkin dibebankan seluruhnya pada masyarakat, sehingga perlu dicarikan dari sumber-sumber pendapatan lain.⁵⁷ Seperti didalam riwayat ketika Imam Ali ra mengatakan “Jangan lah kesejahteraan seseorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun.”⁵⁸

⁵⁵ Halkadri Fitra, ”Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Untuk Mengoptimalkan Manajemen Pendapatan Daerah”. Jurnal WRA, Vol 3 No 2 Tahun 2015, h. 612

⁵⁶ Mahmud, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 26

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Veithzal Rivai Zainal, Nurul Huda, Sri Vandayuli Riorini, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 528

Isi kandungan dari perkataan Imam Ali ra diatas mengingatkan pemerintah agar dalam upaya menciptakan pelayanan publik jangan sampai semua beban biaya di bebaskan kepada masyarakat, seharusnya pemerintah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan yang selama ini tertinggal dari sumber pendapatan lainnya. Sehingga pelayanan publik sebagai penunjang mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan tidak menyebabkan masyarakat merasa terbebani.

Perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan sehingga kemandirian pemerintah daerah meningkat dan pada akhirnya mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.⁵⁹

Dalam hal mewujudkan kontribusi laba agar meningkatkan pendapatan asli daerah, keberadaan BUMN/BUMD harus tetap memikirkan beberapa pertimbangan seperti perusahaan yang berdiri diharapkan mampu bekerja secara efisien dan efektif. Perusahaan yang efisien akan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal demi mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal dan tidak membuang-buang sumber daya yang ada dalam melaksanakan oprasinya.⁶⁰

Suatu operasi tidak efisien jika sebuah manajemen menggunakan sumber daya melebihi jumlah yang diperlukan. Lazimnya , perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang efektif dan efisien. Manajemen yang efisien akan sia-sia jika gagal dalam mencapai tujuannya karena kurang

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰*Ibid*, h.528

efektif melakukan pekerjaan sehingga terjadi pemborosan atau tidak efisien.⁶¹

Agama islam menganjurkan efisiensi dalam segala hal, mulai dari efisiensi keuangan, waktu, bahkan dalam perkataan dan perbuatan yang diperintahkan untuk meninggalkannya apalagi berbuat yang mengandung keburukan atau kerugian.⁶² Seperti dalam Firman Allah Swt berikut:

كَفُورَ الرَّبِّ ۖ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِخْوَانًا نُوَّالْمُبْذِرِينَ إِنَّ

Artinya:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Qs. Al-Isra’ (17):27).⁶³

Menurut Imam Syafi’I mengatakan.”Tabdzir (pemborosan) adalah membelanjakan harta tidak sesuai dengan haknya dan tidak ada pemborosan dalam kebaikan.”Selain itu Malik Asyhab berkata, tabdzir (pemborosan) adalah mengambil haknya dan diletakkan pada selain haknya atau berlebihan adalah haram.⁶⁴

Jika dalam hal pengoptimalan kontribusi laba BUMN/BUMD ayat ini menganjurkan dalam proses pengelolaannya tidak boleh melakukan kegiatan yang merugikan seperti melakukan sifat pemborosan. Pemborosan disini seperti membuang-buang sumber daya yang ada dalam melaksanakan operasionalnya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

⁶³ Departemen Agama, Al Qur’an dan terjemahan, (Bandung:2009), h. 284

⁶⁴ *Ibid*, h.529

B. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya pendapatan asli daerah seyogyanya ditunjang oleh dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan, serta usaha lainnya.⁶⁵

Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶ Lalu menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,

⁶⁵ Widjaja haw, *Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001), h.42.

⁶⁶ Abdul halim, *Manajemen keuangan daerah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h.106.

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁶⁷

Menurut Nurcholis pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah.⁶⁸ Sedangkan menurut Warsito Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.⁶⁹

Dari semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan atau pemasukan pendapatan yang diterima suatu daerah yang dimana pendapatan tersebut berasal dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayahnya sendiri yang dimana dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2014 pasal 285 ayat 1 tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:⁷⁰

- a. Hasil Pajak Daerah.
- b. Hasil Retribusi Daerah.

⁶⁷ Abid Muhtarom, "Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015". Jurnal Ekonomi, Vol.13 No. 1(Maret 2015) h. 660

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Windhu Putra, *Tata kelola ekonomi keuangan daerah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.150

⁷⁰ Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 Pasal 285 Ayat 1

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (antara lain: hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro).

Menurut Mardiasmo Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.⁷¹Sedangkan Sirozujilam dan Mahali menjelaskan bahwa sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:⁷²

- a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang / badan, benda bergerak / tidak bergerak.
- b. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah.

⁷¹ Abid Muhtarom, "Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan periode tahun 2010-2015", Jurnal ekonomi, Vol.13, No.1, tahun 2015, h. 661

⁷² Ibid

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro.

3. Potensi Pendapatan Asli Daerah

Potensi pendapatan asli daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD.⁷³ Analisis potensi PAD diperlukan untuk memetakan potensi yang dimiliki oleh daerah yang nantinya akan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Pemerintah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi dalam pendapatan daerahnya diharapkan mampu mengelolanya secara optimal untuk membiayai pembangunan daerah dan menyediakan pelayanan publik untuk masyarakatnya.⁷⁴

Menganalisa potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang beberapa variabel yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan yaitu: kondisi awal daerah, peningkatan cakupan, perkembangan PDRB perkapita Riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan baru, sumber pendapatan baru dan perubahan peraturan.⁷⁵

4. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, mau tidak mau peranan PAD harus ditingkatkan, karena merupakan salah satu tolak ukur kemampuan

⁷³ Abdul halim, Op.cit, h. 97

⁷⁴ Ni Putu Ari Kusumayanti, Nyoman Triaryati, "Analisis Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten di Bali di Luar Wilayah Sarbagita ", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7, No. 8, tahun 2018, h. 4270

⁷⁵ Abdul Halim, Op.Cit, h. 103

dan cerminan kemandirian daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.⁷⁶

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik bila didukung oleh dana yang memadai, di samping dana dari pusat. Namun demikian, meskipun terdapat bantuan transfer dana dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat, dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang berpotensi harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁷

Menurut Hamrolie untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu memperkirakan/ menghitung potensi, kemudian membandingkan antara potensi dengan realisasi yang telah dicapai. Apabila ternyata terdapat perbedaan yang sangat besar maka segera diteliti kelemahan yang ada, mungkin terletak pada pendaftaran wajib pajak/retribusi, penetapan tarif, cara pemungutan dan cara pengawasan.⁷⁸

Minimnya perolehan PAD masih dianggap hambatan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Padahal kurang efektif dan efesien target untuk mencapai

⁷⁶ Windhu Putra, Op.cit, h. 161

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Ibid, h.152

realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah.⁷⁹

Upaya optimalisasi PAD yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:⁸⁰

- a. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai perkembangan harga dan tingkat inflasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyak sekali tarif pajak daerah tersebut telah diteatpkan sejak lama dan tidak perna dirubah. Akibatnya penetapan tarif tersebut terlalu rendah dibandingkan dengan perkembangan harga.
- b. Penetapan tarif pajak baru sesuai dengan UU yang berlaku terhadap beberapa potensi wajib pajak baru yang ada di daerah yang bersangkutan.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PAD dengan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan objek pajak tertentu.
- d. Menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi dan perekonomian kota serta memfasilitasi investor domestik dan asing bagi pelaksanaan investasi di daerah.
- e. Meningkatkan system insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dalam mengelola pendapatan yan dilakukan.
- f. Intensifikasi merupakan cara yang dilakukan dari dalam untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah dengan memperbaiki

⁷⁹*Ibid*, h.162

⁸⁰*Ibid*, h. 166

kualitas pelayanan dan prosedur keuangan yang baik sebagai bentuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas organisasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

- g. Ekstensifikasi ini dilakukan dengan cara menggali sumber pendapatan daerah. Ekstensifikasi dimaksud dengan usaha maupun dalam bentuk penambahan jumlah objek pajak yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah.

Upaya-upaya ini dapat dilakukan sekaligus guna lebih memaksimalkan peningkatan penerimaan PAD pada daerah yang bersangkutan. Selain itu, dalam upaya meningkatkan PAD yang maksimal juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Artinya optimalisasi PAD tidak hanya memfokuskan beberapa aspek, semisal pajak dan retribusi yang justru kemudian berdampak pada beban kesanggupan masyarakat. Alih-alih meningkatkan kualitas pelayanan publik, pajak dan retribusi yang dipungut justru menimbulkan beban yang baru.⁸¹

5. Pendapatan Asli Daerah dalam perspektif ekonomi islam

Islam sangat mengenal tentang Negara kesejahteraan (welfare state), pertumbuhan dan keseimbangan ekonomi. Dari berbagai unsur itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat regulator dalam melakukan

⁸¹*Ibid, h.167*

kebijakan-kebijakan fiskal, sehingga stabilitas dalam pengeluaran (expenditure) dan distribusi selalu terkendali.⁸²

Islam menekankan dalam pencapaian kesejahteraan yang bersumber pada keuangan publik harus dikelola secara optimal, demi kebutuhan dan kemakmuran generasi yang berkesinambungan, meningkatkan kemaslahatan umat serta tidak boleh berlebihan (extravaganza). Kebijakan Negara dalam pencapaian segala bentuk tujuan kesejahteraan publik ataupun non- publik semuanya harus berjalan secara komprehensif.⁸³

Dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan dalam Adi, Pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bertanggung jawab terhadap perekonomian.⁸⁴

Pada zaman Rasulullah SAW diawali dengan membentuk Baitul Maal. Dimana Baitul maal sengaja dibentuk oleh Rasulullah s.a.w sebagai tempat pengumpulan dana atau pusat pengumpulan kekayaan negara Islam yang digunakan untuk pengeluaran tertentu. Karena pada awal pemerintahan Islam sumber utama pendapatannya adalah Khums, zakat,

⁸² Ahmad Dahlan, "Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4, No.1 Tahun 2010, h. 134

⁸³ Ahmad Dahlan, Op.Cit. h. 133

⁸⁴ Nurul Huda, dkk, *Keuangan publik islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarahnya*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 193

kharaj, dan jizya.⁸⁵ Selain itu pada masa Umar Ibn Khattab dimana aspek pemasukan Negara dalam pemimpinannya antara lain *zakat, fa'I, Ghanimah, jizyah, kharaj, dan ushur*.

a. *Khums*

Para ulama *Syi'i* mengatakan bahwa sumber pendapatannya apa pun harus dikenakan *Khums* sebesar 20%, sedangkan ulama *Sunni* beranggapan bahwa ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid dalam *Adi* menyatakan bahwa yang dimaksud *Khums* ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang.⁸⁶

b. Zakat

Zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu'ain atas tiap tiap orang cukup syarat-syaratnya.⁸⁷ Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak,

⁸⁵ Rasiam, "Kebijaka Fiskal Dalam Islam", Jurnal Khatulistiwa, Vol 4 No. 1, Tahun 2014, h.82

⁸⁶ Nurul Huda, et al, Op.Cit, h. 30

⁸⁷ Ali Ridlo, "Kebjakan Ekonomi Umar Ibn Khattab", Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2 Tahun 2013, h. 5

emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz, dan zakat fitrah.⁸⁸

c. *Kharaj*

Kharaj adalah pajak bumi yang diwajibkan oleh Kepala Negara kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan dengan Negara.⁸⁹ Pajak bumi yang wajib dikeluarkan mengingat tiga kondisi sebagai berikut :⁹⁰

- 1) Bumi yang pemiliknya sudah masuk Islam, tanah atau bumi yang semacam ini adalah sah menjadi kepunyaan pemiliknya, dan tidak boleh ada kewajiban pajak terhadapnya.
- 2) Bumi perdamaian, yaitu setiap bumi yang penduduknya mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam, supaya mereka itu tetap menjadi miliknya. Bumi yang seperti ini wajib dikeluarkan pajaknya, dan bumi itu tetap menjadi milik mereka. Setelah ada kesepakatan antara kedua belak pihak, maka siapapun tidak boleh menguragi atau menambahkan bahkan seorang Kepala Negara sekalipun.
- 3) Bumi taklukan, yaitu bumi yang penduduknya ditaklukkan dengan tajamnya pedang, dan bumi tersebut tidak dibagi-bagikan kepada mereka yang berhak atas

⁸⁸*Ibid*, h. 6

⁸⁹*Ibid*, h. 16

⁹⁰*Ibid*

harta rampasan, melainkan bumi itu tetap menjadi miliknya.

d. Jizyah

Jizyah adalah pajak tahunan yang wajib dibayar oleh orang kafir, orang merdeka atau budak yang ditinggal di wilayah pemerintahan Islam. *Jizyah* juga bisa disebut dengan istilah upeti.⁹¹ Di dalam Alquran dan Hadis tidak ada keterangan yang menerangkan berapa jumlah yang harus ditetapkan oleh seorang Kepala Negara terhadap jizyah atau upeti kepada mereka yang wajib ditari upetinya. Setidaknya upeti terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Upeti yang terjadi Karena kesepakatan antara kaum muslimin dengan kaum yang wajib membayar upeti. Misalnya: Bani Tahglib setelah menjalin kesepakatan dengan kaum muslimin, kemudian membayar zakat dengan uang.
- 2) Upeti yang diwajibkan kepada penduduk negara lain yang ditaklukkan oleh pemerintah Islam. Misalnya: Penduduk Mesir diwajibkan membayar empat dinar, dua irdab (satu irdab sama dengan dua dua empat gantang) dan yang

⁹¹*Ibid*, h. 18

lainnya. Lalu penduduk Yaman diwajibkan membayar upeti sebesar satu dinar.⁹²

e. *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta yang dirampas dari orang-orang Islam dari tentara kafir dengan jalan perang. *Ghanimah* merupakan hal-hal yang dirampas oleh orang-orang Islam dari tentara kafir; tanah, tawanan perang (laki-laki, perempuan, anak-anak), dan harta yang dapat dipindah-pindah (kuda, dirham, pedang, dan sebagainya).⁹³

f. *Fai'*

Fai' (harta rampasan yang ditinggalkan musuh) ialah suatu yang diambil dari harta orang-orang kafir dan diperoleh tidak dengan pertempuran atau tanpa terjadinya perang, seperti *jizyah*, *kharaj*, *'Ushur*.⁹⁴ Pembagian harta *fai'* dibagi menjadi lima bagian sebagaimana Umar Ibn Khatab berpendapat bahwa harta *fai'* dalam pembagian diqiyaskan dengan *ghanimah* (harta rampasan) yaitu seperlima dari *ghanimah* dibagikan kepada Allah dan RasulNya, Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib), Anak Yatim, Fakir Miskin, Ibnu Sabil. Sedangkan empat perlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada mereka yang ikut pertempuran.⁹⁵

⁹²*Ibid*, h. 20

⁹³*Ibid*, h. 9

⁹⁴*Ibid*, h. 11

⁹⁵*Ibid*

g. *Usyur*

Usyur adalah suatu yang diambil oleh negara dari pada pedagang yang melewati negaranya. *Usyur* bisa disebut juga dengan istilah bea cukai. '*Usyur* merupakan pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam, atau datang dari negara Islam itu sendiri.⁹⁶

Peraturan usyur ini telah ada sejak zaman sebelum Islam, yaitu seperti yang diterapkan oleh orang-orang Yunani. '*Usyur* belum sempat dikenal pada masa Rasulullah dan Abu Bakar. Permulaan diterapkannya '*usyur* di negara Islam sebesar dengan sepersepuluh adalah di masa Umar ibn Khaththab, hal ini berlandaskan demi penegakan keadilan.⁹⁷

Orang yang diambil bea cukainya adalah sebagai berikut:⁹⁸

- 1) Orang Islam Yaitu jika orang Islam melewati petugas pemungutan pajak dengan membawa barang dagangan, maka mereka dikenakan bea cukai.
- 2) Kafir Zimmi Yaitu orang kafir yang tidak memerangi Islam, mereka hidup dalam perdamaian dengan masyarakat Islam. mereka juga dikenakan bea cukai jika mereka kedatangan membawa barang dagangan oleh pegawai pajak.
- 3) Kafir Harbi Yaitu orang kafir yang ikut memerangi Islam, mereka termasuk musuh pemerintah Islam.

⁹⁶*Ibid*, h. 20

⁹⁷*Ibid*

⁹⁸*Ibid*, h. 21

Pada perkembangan zaman seperti saat ini ajaran Nabi Muhammad SAW dalam memperoleh pendapatan masih ada yang terus diterapkan sampai saat ini, seperti kharaj, Usyur. Kharaj adalah pajak bumi yang diwajibkan oleh Kepala Negara kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan dengan negara.⁹⁹ Sedangkan Usyur adalah suatu yang diambil oleh negara dari pada pedagang yang melewati negaranya. Usyur bisa disebut juga dengan istilah bea cukai.¹⁰⁰

Pada saat ini khususnya di Kota Bandar Lampung telah mendirikan perbankan syariah yang diharapkan menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah di sektor hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Secara operasional Bank Syariah Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 22 Desember 2008 oleh Bank Indonesia yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No. 148 Bandar Lampung, sehingga pada tanggal 22 Desember 2008 ditetapkan sebagai hari berdirinya Bank Syariah Bandar Lampung.¹⁰¹

Keberadaan Bank Syariah Bandar Lampung memiliki prospek yang cukup menjanjikan dikarenakan di Bandar Lampung satu-satunya BPR yang beroperasi dengan prinsip syariah adalah BPRS Bandar Lampung. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat animo masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan karena penduduk di Kota Bandar Lampung mayoritas muslim,

⁹⁹*Ibid*, h. 16

¹⁰⁰*Ibid*, h. 20

¹⁰¹ “Bank Syariah Bandar Lampung: PT. BPRS Bandar Lampung” (Online), tersedia di : <http://Banksyariahbandarlampung.co.id/sejarah/> (6 April 2019, PUKUL 17:24 WIB)

sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama BPRS.¹⁰²

Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah, BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat di Kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan.¹⁰³

C. Kebijakan pemerintah menurut perspektif islam

Pandangan islam terhadap masalah kekayaan berbeda dengan pandangan islam terhadap masalah pemanfaatan kekayaan. Menurut islam, sarana-sarana yang memberikan kegunaan adalah masalah tersendiri, sedangkan perolehan kegunaan adalah masalah lain. Karena itu sumber daya dan tenaga manusia, dua-duanya merupakan kekayaan, sekaligus sarana yang bisa memberikan kegunaan atau manfaat. Sehingga, kedudukan kedua-duanya dalam pandangan islam, dari segi keberadaan dan produksinya dalam kehidupan, berbeda dengan kedudukan pemanfaatan serta tata cara perolehan manfaatnya.¹⁰⁴

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 50

Islam juga ikut campur tangan dalam masalah pemanfaatan kekayaan dengan cara yang jelas. Islam, misalnya mengharamkan pemanfaatan beberapa bentuk harta kekayaan, misalnya khamer dan bangkai. Sebagaimana islam juga mengharamkan pemanfaatan beberapa tenaga manusia, seperti dansa (tari-tarian) dan pelacuran.¹⁰⁵

Islam juga mengharamkan menjual harta kekayaan yang haram untuk dimakan, serta mengharamkan menyewa tenaga untuk melakukan sesuatu yang haram dilakukan. Ini dari segi pemanfaatan harta kekayaan dan pemanfaatan tenaga manusia. Sedangkan dari segi tata cara perolehannya, islam telah mensyariatkan hukum-hukum tentu dalam rangka memperoleh kekayaan, seperti hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh kekayaan, seperti hukum-hukum berburu, menghidupkan tanah mati, hukum-hukum kontrak jasa, industri serta hukum-hukum waris,hibbah dan wasiat.¹⁰⁶

Selain itu Islam menekankan dalam pencapaian kesejahteraan yang bersumber pada keuangan publik harus dikelola secara optimal, demi kebutuhan dan kemakmuran generasi yang berkesinambungan, meningkatkan kemaslahatan umat serta tidak boleh berlebihan (*extravaganza*).Kebijakan Negara dalam pencapaian segala bentuk tujuan kesejahteraan publik ataupun non- publik semuanya harus berjalan secara komprehensif.

¹⁰⁵*Ibid*, h. 51

¹⁰⁶*Ibid*

Pemegang otoritas (pemerintah atau pimpinan lembaga) merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola aset publik, baik yang berupa barang ataupun jasa, menjaga dan mengatur sistem pemanfaatannya bagi masyarakat. Hal ini bisa dilihat secara jelas dari ucapan Umar bin Khathab ra. Terdahulu “Ingatlah, sesungguhnya kudapati kebaikan harta (Negara) ini kecuali dengan tiga hal, yakni diambil dengan prosedur, dibelanjakan dengan prosedur, dan dicegah dari kebatilan. Ingatlah sesungguhnya kedudukanku terhadap hartamu semata-mata bagaikan pengampu anak yatim. Jika aku menjaga diri (tidak mengutak-atinya), dan jika aku miskin maka aku akan mengambilnya dengan cara yang makruf, memakan sedikit sekedar mengunyah dengan ujung gigi, bukan dengan sepenuh mulut.”¹⁰⁷

Dari ucapan Umar bin Khatab diatas dapat disimpulkan bahwa beliau memperingatkan para pemegang otoritas disuatu daerah agar menetapkan kebijakan dalam upaya memperoleh dan mengelola pendapatan daerah harus berdasarkan Al Quran dan Hadis agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Dalam islam dianjurkan segala kebijakan yang diterapkan pemimpin diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang sesuai ajaran islam seperti berperilaku adil. Dalam islam konsep adil adalah tidak menzalimi dan tidak terzalimi, sebagaimana dalam firman Allah Swt berikut:

¹⁰⁷Husain Husain Syahatah, *Perlindungan aset publik dalam perspektif hukum islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 43.

نَنَّا نِيَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
بِمَا خَبِيرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا أَعْدِلُوا أَلَا عَلَى قَوْمٍ شِدْ
تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(Qs. Al-Maidah (5):8)¹⁰⁸

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa didalam Al Qran telah memerintahkan pemimpin agar selalu berperilaku adil dalam menetapkan segala peraturan baik itu terhadap golongan yang berpihak padamu maupun golongan yang berbeda denganmu agar keajahteraan masyarakat dapat tercapai secara adil dan merata.

Menurut Robert H. Frank dalam Karim bahwa sama rasa sama rata tidak adil dalam pandangan islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras. Misalnya, Umar Bin Khattab ra. Menetapkan tarif *kharaj* yang berbeda untuk lahan yang ditanami tanaman yang berbeda. Tanaman yang ditanami gandum tarifnya satu dirham ditambah satu *qafiz*; untuk buah-buahan tarifnya sepuluh dirham, untuk lada tarifnya lima dirham.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahan, (Bandung:2009), h.108

¹⁰⁹ Veithzal Rivai Zainal, Nurul Huda, Sri Vandayuli Riorini, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.532

Begitu juga dengan pembagian harta di *Baitul Maal*, Umar ra. mengatur tunjangan per tahun untuk keluarga Rasulullah Saw. Abbas ibn Abdul Mutaib mendapat 12.000 dirham, istri-istri Rasulullah mendapatkan 12.000 dirham, Safiyah ibn Abdul Mutaib 6000 dirham, Ali, Hasan, Husein, Mujahid Badar masing-masing mendapatkan 50000 dirham, kaum Anshar, Mujahid Uhud, dan Muhajirin ke Abisinia masing-masing 4000 dirham, yatim ahli Badar 2000 dirham, dan seterusnya sampai seorang gembala di gurun sinai juga mendapat bagian.¹¹⁰

Kebijakan yang dilakukan Umar bin Khatab ini menjelaskan bahwa didalam islam tidak mengenal dengan istilah “sama rata sama rasa” karena pada dasarnya usahanya manusia didalam hidupnya berbeda-beda. jadi ketika Umar menetapkan suatu harga barang dengan barang jenis lain itu berbeda, karena Umar menetapkan tarif sesuai dengan usaha apa yang dijalankan oleh orang itu. Semakin bernilai tinggi usaha yang dijalankan seseorang maka semakin tinggi tarif yang ditetapkan dan sebaliknya semakin rendah usaha yang dijalankan oleh seseorang maka semakin rendah tarif yang diberikan umar padanya.

Selain menetapkan kebijakan yang adil, islam juga memberikan perhatian yang lebih tentang distribusi pendapatan dalam masyarakat. Islam juga memperhatikan berbagai sisi dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya seperti jual beli, hutang piutang, dan

¹¹⁰*Ibid*

sebagainya.¹¹¹ Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep islam antara lain:¹¹²

1. Konsep islam, distribusi pendapatan masyarakat adalah bagian dan bentuk kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri pada Allah. Oleh karena itu, distribusi dalam islam akan menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati karena tidak akan sempurna eksistensi individu sebagai manusia tanpa individu lainnya.
2. Seorang muslim akan menghindari praktik distribusi barang-barang yang merusak masyarakat seperti minuman keras, obat terlarang, pembajakan, dan sebagainya. Dalam islam distribusi tidak hanya didasarkan optimalisasi dampak barang tersebut terhadap kemampuan orang, tetapi pengaruh barang tersebut terhadap perilaku masyarakat yang mengkonsumsinya.
3. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme pendistribusian dengan mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan kelompok dan perorangan. Oleh karena itu sektor publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat jangan sampai jatuh ke tangan orang yang egois dengan visi kepentingan kelompok, golongan, dan pribadinya.

Prof. Muhammad Al-Bahi telah merumuskan peran Negara dalam melindungi aset publik sebagai berikut.¹¹³

1. Membuat aturan penggarapan lahan milik Negara yang merupakan pokok kepemilikan umum rakyat. Negara tidak boleh menggap sepele hal

¹¹¹*Ibid*

¹¹²*Ibid*, h. 533

¹¹³Husain Husain Syahatah, Loc.Cit,h. 44

tersebut dengan hanya sekedar memberikan imbauan atau anjuran untuk menggarap lahan, atau dengan cara mengambil kembali lahan Negara dari orang yang diberi hak pengelolaannya tanpa berinisiasi menggarapnya lagi.

2. Mengatur pemanfaatan aset publik oleh rakyat sambil membuat keputusan sistem dan aturan yang memudahkan hal tersebut dan mencegah perselisihan. Juga menyingkirkan penghalang birokrasi yang merintangai pemanfaatan aset tersebut. Termasuk dalam hal ini memelihara, memperbaiki, membersihkan, mengfungsikan aset tersebut.
3. Tidak dibenarkan menetapkan kepenuhan aset publik untuk dirinya sendiri atau kerabat kroni, dan pendukung-pendukungnya, serta memberikan hak istimewa bagi mereka yang tidak bisa dinikmati orang lain. Sebab berbagai macam kepemilikan umum adalah milik semua orang.

D. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang digunakan untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, antara lain :

1. Jihan Annisa pada tahun 2017 dengan judul “Peranan Badan Usaha Milik Daerah PT. Tanjung Pinang Makmur bersama Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengambilan sampel melalui

wawancara dan dokumentasi. Hasil inipenelitian menunjukkan bahwa peran perusahaan milik daerah PT.TMB pada umumnya dapat dikategorikan cukup baik, dengan peran yang paling banyak adalah peran informasi.¹¹⁴

2. Ainun Lativah pada tahun 2018 dengan judul “Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan masih belum maksimal dengan ditandai oleh tidak tercapainya hasil penerimaan retribusi pasar karena berbagai kendala dalam pelaksanaa pengelolaan retribusi pajak.¹¹⁵
3. Bayu Pratama putra pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Kontribusi Laba Perusahaan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015”, penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laba BUMD dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD kota Tanjung Pinang periode 2010-2015. Dengan hasil penelitian bahwa

¹¹⁴ Jihan Annisa, *“Peranan Badan Usaha Milik Daerah PT. Tanjung Pinang Makmur bersama Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang”*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang Kep. Riau. 2017

¹¹⁵ Ainun Lativa, *“Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung”*. Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

BUMD memiliki kontribusi terhadap PAD di Tanjung Pinang dimana setiap tahunnya bersifat fluktuatif di tahun 2010-2015.¹¹⁶

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas dapat diliat bahwa memiliki perbedaan. Diantara perbedaan di hal lokasi, contohnya pada penelitian yang dilakukan oleh Jihan Annisa dan Bayu Pratama putra meskipun memiliki variabel X dan Y yang sama namun lokasi yang diteliti berbeda selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh saya memiliki kelebihan, yaitu kelebihan dari penelitian saya ini adalah saya menjelaskan masalah dari sudut pandang ekonomi islam yang dimana pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ainun Lativah memiliki perbedaan di variabel X, yang dimana pada penelitian terdahulu ini variabel X lebih fokus pada retribusi pasar berbeda dengan penelitian saya yang berfokus pada laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jadi penelitian yang saya lakukan ini bisa dijadikan pelengkap atau pembaruan dari penelitian terdahulu.

E. Kerangka pemikiran

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD).¹¹⁷ Sebab dari pada itu pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, yang dimana

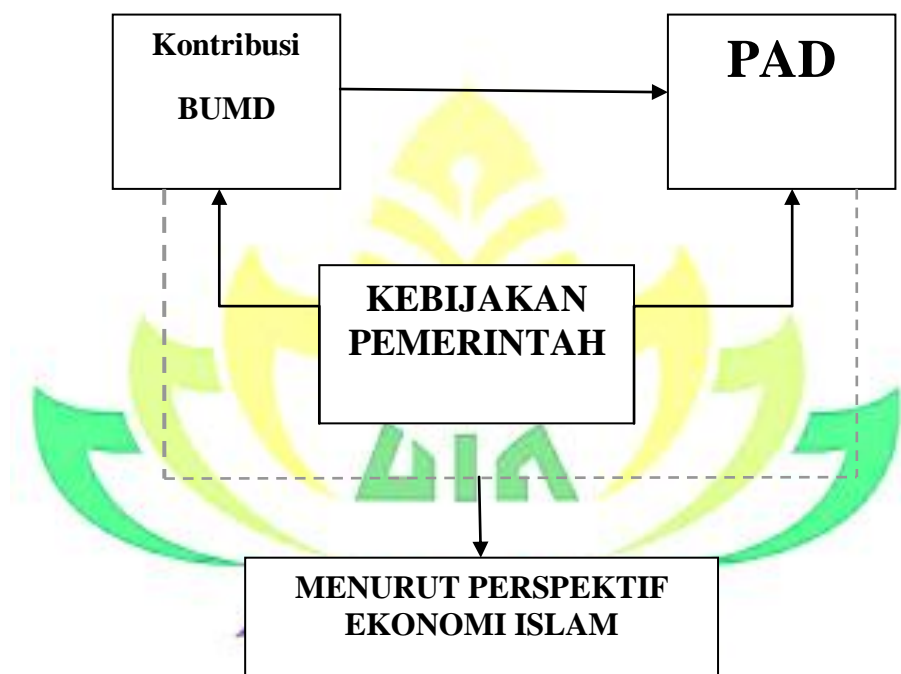
¹¹⁶ Bayu Pratama Putra, "Analisis Kontribusi Laba Perusahaan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015". Skripsi fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 2016

¹¹⁷ Yudho Taruno Muryanto, Djuwityastuti, Op.cit, h.126

BUMD merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung. Berikut ini merupakan skema kerangka pemikiran mengenai Analisis Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Gambar 1

Kerangka pemikiran



Gambar kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan akan menguji pengaruh kontribusi laba BUMD terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar lampung dan peran pemerintah dalam menjadikan laba BUMD sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung yang menurut Perspektif Ekonomi Islam.

BAB III

Penyajian data penelitian

C. Gambaran umum Gambaran Umum Lokasi penelitian

1. Gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

Awal pembentukannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum berdiri sendiri melainkan masih termasuk didalam bagian Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), kemudian pada tahun 2010 DISPENDA mengalami pemecahan bagian sehingga membuat dispenda menjadi dua badan yaitu menjadi bagian Dinas keuangan dan bagian dinas pendapatan daerah.¹¹⁸

Pada tahun 2016 dinas keuangan mengalami pemisahan kembali menjadi dua badan yaitu badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).¹¹⁹

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintah. BPKAD Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah dan aset daerah. BPKAD Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah

¹¹⁸ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

¹¹⁹ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

Kota Bandar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.¹²⁰

2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

a. Pernyataan Visi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung adalah “*Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel*”.¹²¹ Penjelasan Visi dari Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel yaitu memiliki arti bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Bandar Lampung harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab sebagaimana wujud dari pertanggung jawaban kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung Kota Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis ekonomi Kerakyatan.¹²²

b. Pernyataan Misi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan beberapa misi yang bertujuan untuk mewujudkan visi yang ingin diraih. Misi tersebut sebagai berikut:¹²³

¹²⁰ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

¹²¹ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

¹²² Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

¹²³ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

- 1) Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran serta Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional;
 - 2) Meningkatkan kinerja perencanaan dan Penganggaran APBD;
 - 3) Mewujudkan Pengelolaan Kas dan Perbendaharaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien;
 - 4) Mewujudkan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
 - 5) Mewujudkan penatausahaan dan pemanfaatan aset yang tertib dan akurat;
 - 6) Mengembangkan kapasitas pendukung sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung
- a. Tugas Pokok
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintah. BPKAD Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakandaerah di bidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah dan aset daerah.¹²⁴

¹²⁴ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

b. Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:¹²⁵

- 1) Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah dan aset daerah;
 - 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai tugas lingkupnya;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Di dalam suatu organisasi pasti terdapat struktur organisasi yang dimana bertujuan untuk membagi pekerjaan dengan melihat tugas dan fungsi masing-masing bagian agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan atau dikerjakan secara maksimal. Begitu juga di dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di mana memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

¹²⁵ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung

Kepala badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan, investasi, pinjaman daerah dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²⁶

b. Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan. Sekretariat membawahi beberapa sub bagian sebagai berikut:¹²⁷

1) Sub Bagian Program dan Informasi

Sub bagian ini mempunyai tugas seperti:

- a) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan serta informasi Badan;
- b) Menghimpun dan menyusun program dan kegiatan Badan; menghimpun dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- c) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Badan;
- d) Menghimpun, menyimpan, serta menyampaikan data dan informasi Badan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

¹²⁶ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

¹²⁷ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian ini mempunyai tugas seperti:

- a) Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, urusan humas, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- b) Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai serta pensiun;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan umum dan kepegawaian; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,¹²⁸

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub bagian ini mempunyai tugas seperti

- a) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Badan;
- b) Melaksanakan pembukuan, pertanggung jawaban, pelaporan keuangan dan aset Badan;
- c) Menyiapkan bahan dalam rangka usulan penetapan bendahara; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

¹²⁸ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

c. Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang anggaran meliputi kebijakan perencanaan anggaran, penyusunan APBD, dan pengendalian anggaran. Bidang anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Bidang Anggaran membawahi beberapa sub bidang seperti berikut:¹²⁹

1) Sub Bidang Kebijakan Perencanaan Anggaran

Sub Bidang Kebijakan Perencanaan Anggaran mempunyai tugas seperti:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Perencanaan Anggaran;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan standar harga satuan pokok kegiatan tahun anggaran berkenaan;
- d) Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang kebijakan perencanaan anggaran; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

¹²⁹ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

2) Sub Bidang Kebijakan Perencanaan Anggaran

Sub Bidang Kebijakan Perencanaan Anggaran mempunyai tugas seperti:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Perencanaan Anggaran;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan standar harga satuan pokok kegiatan tahun anggaran berkenaan;
- d) Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang kebijakan perencanaan anggaran; dan
- f) Melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Atasan.¹³⁰

3) Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Sub bidang ini mempunyai tugas seperti:

- a) Menyiapkan data dalam penyusunan anggaran kas;
- b) Menyiapkan surat penyediaan dana satuan kerja perangkat daerah (SPD-SKPD) untuk pelaksanaan anggaran kas;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pengendalian anggaran;

¹³⁰ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

- d) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang pengendalian anggaran; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Akutansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang akuntansi, Bidang Akuntansi membawahi beberapa sub bidang seperti berikut:¹³¹

1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD

Sub bidang ini mempunyai tugas seperti:

- a) mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan BUMD dalam rangka penyusunan telaahan, evaluasi, dan saran tindakan bagi pengembangan usaha BUMD;
- b) Membantu memantau dan mengendalikan penyertaan modal daerah yang ada di BUMD;
- c) Membantu memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban pinjaman daerah;
- d) Membantu melaksanakan pembinaan penyusunan laporan keuangan kepada SKPD, BLUD dan BUMD;
- e) Membantu melaksanakan monitoring serta evaluasi terkait dengan kegiatan penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD, BLUD dan BUMD;

¹³¹ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

- f) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang monitoring dan evaluasi laporan keuangan SKPD; dan
- g) Melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan.¹³²

2) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Sub bidang ini mempunyai tugas seperti

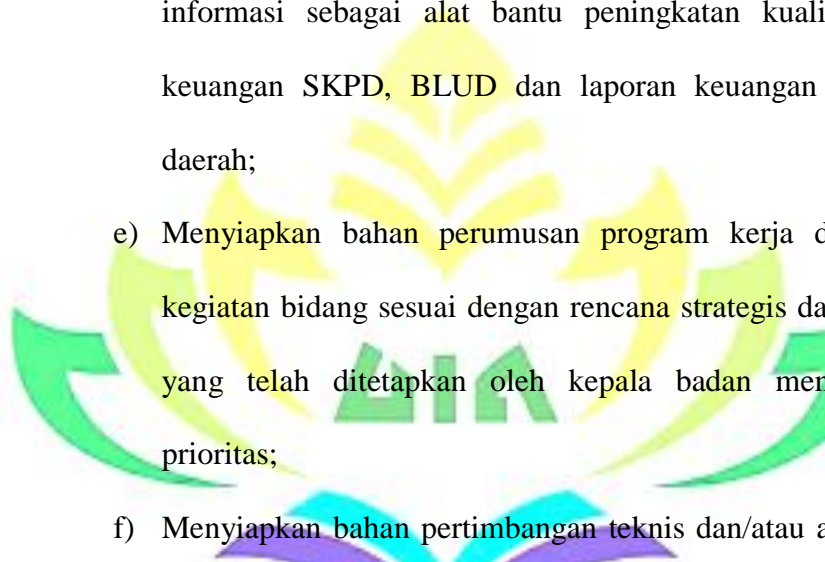
- a) Mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan daerah;
- b) Membantu memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk;
- c) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah semester pertama dan prognosis semester kedua;
- d) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; membantu meningkatkan kompetensi SDM penyusunan laporan keuangan pada SKPD dan BLUD;¹³³
- e) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang akuntansi dan pelaporan; dan
- f) Melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Sub bidang Impementasi Konsepsi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan

Sub bidang ini mempunyai tugas seperti:

¹³² Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

¹³³ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

- 
- a) Merumuskan konsepsi kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Merumuskan tahap-tahap implementasi konsepsi kebijakan dan sistem akuntansi pada tingkat SKPD;
 - c) Merumuskan petunjuk teknis serta rencana strategis peningkatan kualitas laporan keuangan daerah;
 - d) Menyiapkan bahan perumusan dan pengembangan teknologi informasi sebagai alat bantu peningkatan kualitas laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
 - e) Menyiapkan bahan perumusan program kerja dan rencana kegiatan bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala badan menurut skala prioritas;
 - f) Menyiapkan bahan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang akuntansi;
 - g) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang implementasi konsepsi kebijakan akuntansi pemerintahan; dan
 - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.¹³⁴

¹³⁴ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

e. Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan membawahi beberapa sub bidang seperti berikut:¹³⁵

1) Sub Bidang Pengeluaran Kas dan Fasilitas Pelaksanaan Anggaran

Sub bidang ini mempunyai tugas seperti:

- a) Membantu melakukan uji formal terhadap SPM dan pengendalian belanja SKPD;
- b) Menyiapkan SP2D dan kelengkapannya;
- c) Mengumpulkan dan membantu melakukan verifikasi laporan fungsional SKPD;
- d) Melaksanakan analisis pemberdayaan dan pemanfaatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
- e) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang pengeluaran kas dan fasilitas pelaksanaan anggaran; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.¹³⁶

2) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji

Sub bidang ini mempunyai tugas:

- a) Membantu melakukan uji formal terhadap SPM gaji pegawai;

¹³⁵ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

¹³⁶ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi gaji pegawai;
 - c) Melakukan perhitungan gaji pegawai;
 - d) Membantu memproses penerbitan surat keputusan pemberhentian pembayaran (SKPP);
 - e) Melakukan koordinasi kepada lembaga/instansi terkait asuransi, kesehatan, dan pensiun;
 - f) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang pengelolaan administrasi gaji; dan
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 3) Sub Bidang Kebijakan Belanja

Sub bidang ini mempunyai tugas seperti:

- a) Melakukan pembinaan pada bendahara SKPD;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
- c) Menyiapkan bahan keputusan kepala daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi penyerapan dana perimbangan;
- e) Melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- f) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang Kebijakan Belanja; dan
- g) Melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan.¹³⁷

¹³⁷ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

f. Bidang Aset Daerah

Bidang aset daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang aset meliputi penata usahaan aset daerah, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah serta pemindah tanganan dan penghapusan aset daerah.

Bidang aset daerah membawahi beberapa sub bidang seperti berikut.¹³⁸

1) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah

Sub bidang ini mempunyai tugas seperti:

- a) Melakukan pendaftaran dan pencatatan aset daerah kedalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Barang Daerah;
- b) Menghimpun daftar barang pengguna yang dibuat oleh pengguna barang;
- c) Menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan daftar barang pengguna dan daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang;

¹³⁸ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

- d) Menghimpun dan melakukan rekapitulasi terhadap laporan hasil inventarisasi aset daerah yang dilakukan oleh pengguna barang;
 - e) Melakukan inventarisasi aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - f) Menyusun laporan barang pengelola semesteran dan laporan barang pengelola tahunan;
 - g) Menyiapkan bahan untuk penilaian aset daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Walikota;
 - h) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi lain/terkait tugas penatausahaan aset daerah;
 - i) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang penatausahaan aset daerah; dan
 - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.¹³⁹
- 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah
- Sub bidang ini mempunyai tugas seperti:
- a) Menyiapkan bahan untuk penilaian aset daerah dalam rangka pemanfaatan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh walikota;
 - b) Melaksanakan pengamanan administrasi aset daerah;

¹³⁹ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

- c) Menyimpan dokumen kepemilikan aset daerah berupa tanah dan kendaraan milik pemerintah daerah;
 - d) Melakukan monitoring atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindah tanganan aset daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindah tanganan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Menyusun dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) meliputi RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan, RKBMD penghapusan;
 - f) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi lain/terkait tugas pemanfaatan dan pengawasan aset daerah;
 - g) Menyiapkan bahan dalam rangka proses tuntutan ganti rugi (TGR);
 - h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang pemanfaatan dan pengawasan aset daerah; dan
 - i) Melaksanakantugas lain yang diberikanatasan.¹⁴⁰
- 3) Sub Bidang Pemindah tanganan dan Penghapusan Aset Daerah
- Sub bidang ini mempunyai tugas seperti:
- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi pemindah tanganan aset daerah;

¹⁴⁰ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

- b) Menyiapkan bahan untuk penilaian aset daerah dalam rangka pemindah tanganan aset daerah yang dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik;
 - c) Melaksanakan pengelolaan administrasi pemusnahan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Melaksanakan pengelolaan administrasi penghapusan aset daerah yang disebabkan karena penyerahan, pengalihan status, pemindah tanganan, dan tindak lanjut putusan pengadilan;
 - e) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi lain/terkait tugas pemindah tanganan dan penghapusan aset daerah;
 - f) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang pemindah tanganan dan penghapusan aset daerah; dan
 - g) Melaksanakantugas lain yang diberikanatasan.¹⁴¹
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) Kas Daerah

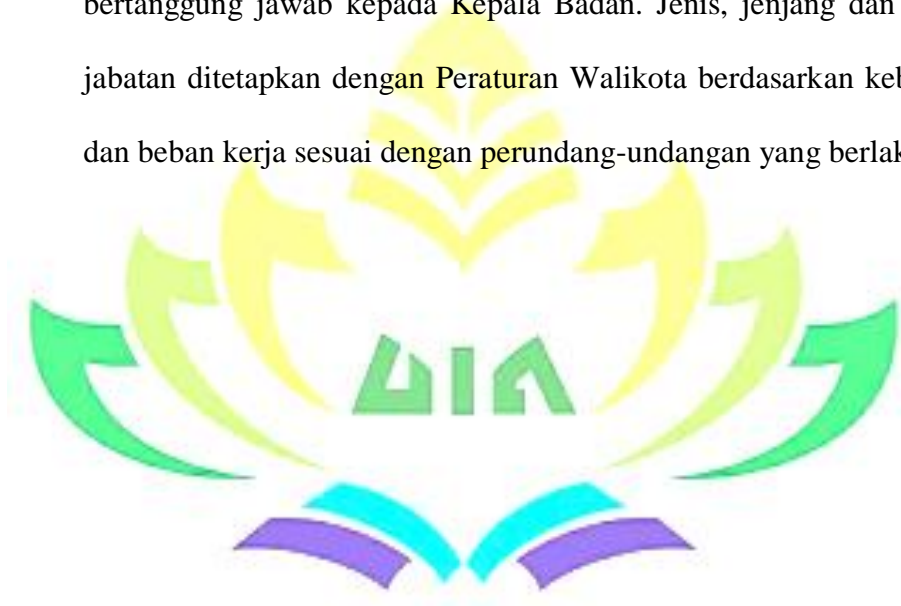
Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 96 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, UPT Kasda merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. UPT Kas Daerah

¹⁴¹ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan di bidang Kas Daerah meliputi Pelayanan Administrasi keuangan, penerimaan, pengeluaran, dan pencatatan pajak daerah dan pelaporan kas daerah.¹⁴²

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴³

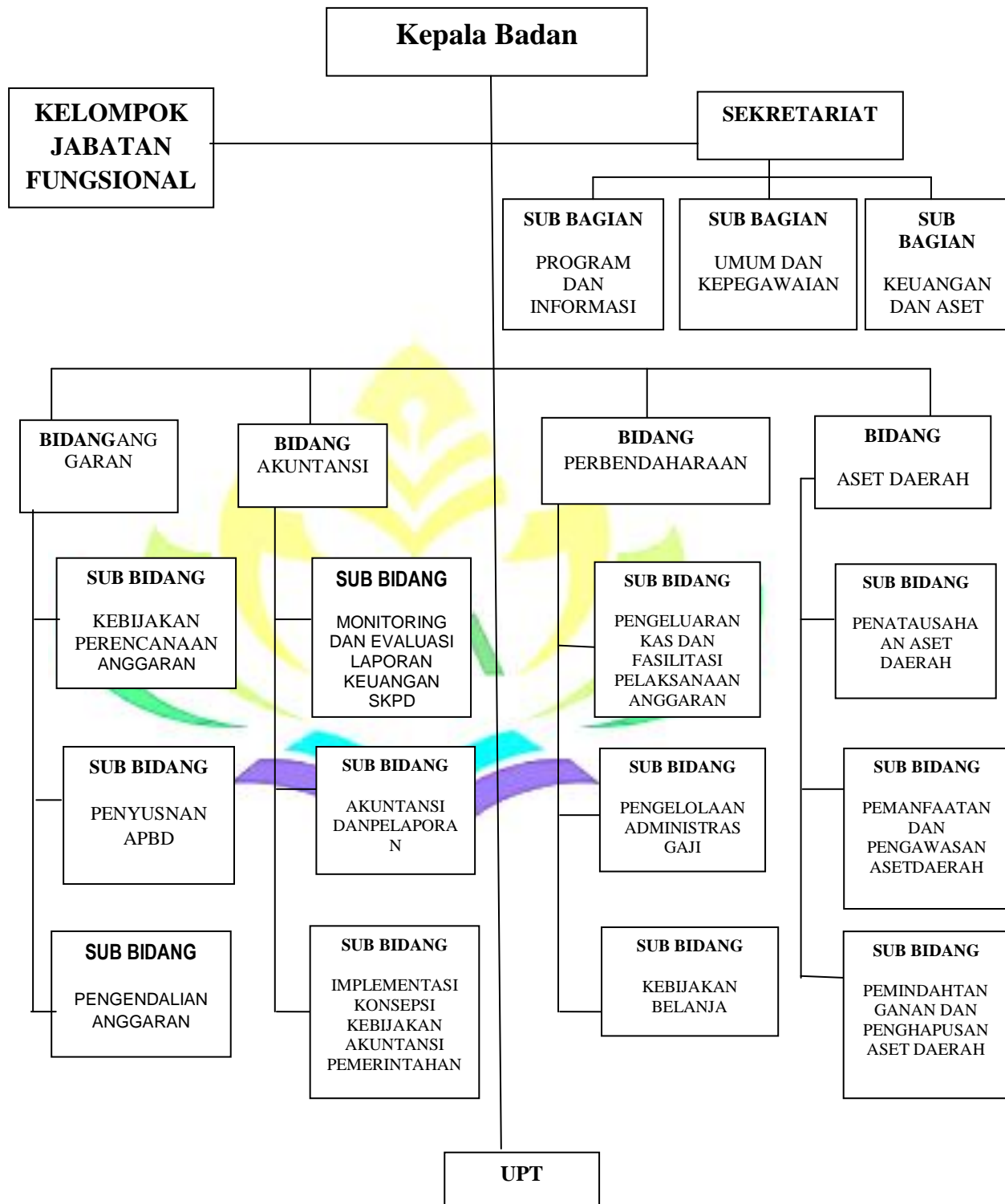


¹⁴² Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

¹⁴³ Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019

Gambar 2

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



5. Kebijakan pemerintah dalam laba Badan Usaha Milik Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pada awalnya BUMD didirikan untuk menunjang kinerja pemerintah dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi pelayananan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya BUMD juga didirikan dengan harapan mendorong ekonomi daerahnya. Sejalan dengan itu dibentuknya BUMD di kota Bandar lampung merupakan cara pemerintah daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk kepentingan dalam hal menjalankan pemerintahan daerahnya. Namun dalam perkembangannya keberadaan BUMD justru menjadi sektor yang lemah dalam hal memperoleh pendapatan asli daerahnya.¹⁴⁴

Pendapat ini dikarenakan setiap tahunnya laba bumd yang dihasilkan masih jauh tertinggal dari sektor penerimaan pendapatan asli daerah lainnya.Selain itu Kendala yang dihadapi dalam kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah adalah masih didominasi oleh BUMD di sektor perbankan.BUMD aneka usaha yang sebagian besar bertujuan untuk menghasilkan laba dalam praktiknya masih belum berkontribusi secara signifikan. Sementara sektor PDAM yang bergerak di salah satu sektor strategis dalam praktiknya lebih

¹⁴⁴ Bapak Andi Budiman, pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wawancara dengan penulis pada tanggal 15 April 2019

diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas cakupan dari pada sekedar memperoleh laba.¹⁴⁵

Hasil kontribusi laba yang diterima oleh Kota Bandar Lampung sebagai berikut.

Tabel 4
Realisasi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kota Bandar Lampung tahun 2012-2018

Tahun	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Total Pendapatan Asli Daerah
2012	6.862.738.923,00	300.696,062.096,22
2013	8.237.246.269,54	360.698.350.030,13
2014	13.206.503.301,24	394.646.889.455,86
2015	11.249.897.883,27	397.547.326.194,00
2016	10.886.472.354,14	483.379.398.037,47
2017	13.461.922.795,62	613.208.672.046,62
2018	14.894.667.167,54	678.365.881.579,00

Hasil yang diperoleh dari tabel diatas menunjukkan bahwa laba BUMD yang diperoleh setiap tahunnya masih terbilang rendah. Meskipun laba yang diperoleh dari BUMD masih terbilang rendah namun laba BUMD yang ada di Kota Bandar Lampung masih memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan PAD kota Bandar Lampung dilihat dari penerimaan setiap tahunnya mengalami

¹⁴⁵ Bapak Andi Budiman, pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wawancara dengan penulis pada tanggal 15 April 2019

perolehan yang meningkat. Melihat potensi yang masih dimiliki BUMD ini maka pemerintah mulai mencoba untuk memaksimalkan keberadaan BUMD dengan tujuan agar penerimaan dana dari laba bumd bisa diperoleh lebih besar lagi.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal memaksimalkan keberadaan BUMD agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah memaksimalkan semua potensi yang ada di daerah secara efisien dan secara optimal, mengelola kekayaan daerah dengan teknologi yang baik agar dapat memperoleh hasil yang optimal, selain itu pemerintah juga melakukan suatu langkah yang nyata seperti memberikan bantuan kepada BUMD yang berdiri tersebut berupa subsidi dana yang dimana dana tersebut diharapkan dapat digunakan dengan baik agar dapat mengembangkan BUMD menjadi lebih optimal.¹⁴⁶

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan BUMD adalah menerapkan suatu sistem yang disebut Swakelola mandiri. Konsep pengelolaan ini menggunakan pengawasan ataupun pembinaan secara bertanggung jawab dan intensif. Pengelolaan yang dilakukan dengan cara pengawasan dan pembinaan secara langsung oleh kepala daerah selaku pemegang otoritas tertinggi pemerintahan daerah memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk dapat melakukan

¹⁴⁶ Bapak Andi Budiman, pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wawancara dengan penulis pada tanggal 15 April 2019

intervensi kebijakan dalam konteks yang bersifat positif terkait dengan kinerja BUMD melalui dewan pengawas.¹⁴⁷

Pengelolaan BUMD dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah juga menyebutkan bahwa dalam hal pengelolaan BUMD salah satunya harus mengandung unsur tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu dalam peraturan daerah pasal 92 tidak jauh berbeda menjelaskan bahwa Pengurusan BUMD harus dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yang dimana terdiri atas prinsip: seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Tujuan dari penetapan peraturan tentang pengurusan yang baik salah satunya adalah agar mendorong organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD, hal ini yang membuat BUMD dalam hal proses kegiatannya tidak boleh merugikan masyarakat sekitar.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Bapak Andi Budiman, pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wawancara dengan penulis pada tanggal 15 April 2019

¹⁴⁸ Bapak Andi Budiman, pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wawancara dengan penulis pada tanggal 15 April 2019

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung

Kemampuan suatu daerah dalam menggali atau mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya akan berpengaruh pada perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Dalam proses menggali dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, daerah tidak hanya dituntut untuk melihat peluang potensi yang sudah ada di daerah tersebut, tetapi mengharuskan daerah tersebut memiliki kemampuan dalam membangun potensi yang baru, sejalan dengan penjelasan tersebut Kota Bandar Lampung diharapkan dapat mengoptimalkan sektor penerimaan pendapatan asli daerah yang telah ada namun belum terlalu maksimal pemanfaatannya, salah satu sektor penerimaan PAD yang tertinggal di Kota Bandar Lampung adalah hasil badan usaha milik daerah (BUMD).

BUMD menurut Undang-Undang adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Kota Bandar Lampung sendiri memiliki beberapa BUMD yang berdiri diantaranya adalah Bank Lampung, PD Bank Pasar Kota, PDAM Way Rilau, Pembagian Bunga Kredit Ekor, PT.Bps syariah Kota Bandar Lampung.

Perolehan laba dari beberapa BUMD yang ada di Kota Bandar Lampung terhadap pendapatan daerah dari tahun 2012-2018 dijelaskan pada tabel dibawah ini. Sebagai berikut:

Tabel 5
Laporan tahunan laba BUMD di kota Bandar Lampung tahun 2012-2018

(000 Rp)

Tahun penerimaan Laba BUMD	Nama-nama BUMD di Kota Bandar Lampung						Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung per tahun
	Bank Lampung	PD Bank Pasar Kota	PDAM Way Rilau	Pembagian bunga kredit ekor	PT. BPR Syariah Kota Bandar Lampung	Total penerimaan laba BUMD per tahun	
2012	1.862.738.923,00	5.000.000.000,00	0,00		0,00	6.862.738.923,00	300.696,062.096,22
2013	2.418.737.568,54	5.500.000.000,00	250.000.000,00	68.508.701,00	0,00	8.237.246.269,54	360.698.350.030,13
2014	3.647.960.408,31	9.221.589.469,93	250.000.000,00	86.953.423,00	0,00	13.206.503.301,24	394.646.889.455,86
2015	5.476.622.932,46	5.207.360.513,81	500.000.000,00	65.914.437,00	0,00	11.249.897.883,27	397.547.326.194,00
2016	6.262.989.534,88	4.123.482.819,26	500.000.000,00	0,00	0,00	10.886.472.354,14	483.379.398.037,47
2017	5.283.015.830,62	5.779.915.793,00	2.000.000.000,00	0,00	398.991.172,00	13.461.922.795,62	613.208.672.046,62
2018	5.336.465.955,54	6.921.138.591,00	2.000.000.000,00	0,00	637.062.621,00	14.894.667.167,54	678.365.881.579,00

Sumber: Kantor Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah



Data pada tabel diatas dapat digunakan untuk melihat kontribusi Laba BUMD terhadap pendapatan asli daerah, baik itu kontribusi kesecara seluruhan ataupun kontribusi setiap BUMD yang ada terhadap pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk melihat Kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dapat sebagai berikut

$$\text{kontribusi laba BUMD} = \frac{X}{Y} \times 100$$

Keterangan:

X= Penerimaan laba BUMD

Y= Total pendapatan PAD

1. Kontribusi Laba BUMD Bank Lampung terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2018

a. Kontribusi Laba BUMD Bank Lampung terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{1.862.738.923,00}{300.696.062.096,22} \times 100 \\ &= 0,62\%\end{aligned}$$

- b. Kontribusi Laba BUMD Bank Lampung terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{2.418.737.568,54}{360.698.350.030,13} \times 100 \\ &= 0,67\%\end{aligned}$$

- c. Kontribusi Laba BUMD Bank Lampung terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{3.647.960.408,31}{394.646.889.455,86} \times 100 \\ &= 0,92\%\end{aligned}$$

- d. Kontribusi Laba BUMD Bank Lampung terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{5.476.622.932,46}{397.547.326.194,00} \times 100 \\ &= 1,38\%\end{aligned}$$

- e. Kontribusi Laba BUMD Bank Lampung terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{6.262.989.534,88}{483.379.398.037,47} \times 100 \\ &= 1,29\%\end{aligned}$$

- f. Kontribusi Laba BUMD Bank Lampung terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{5.283.015.830,62}{613.208.672.046,62} \times 100 \\ &= 0,86\%\end{aligned}$$

- g. Kontribusi Laba BUMD Bank Lampung terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{5.336.465.955,54}{678.365.881.579,00} \times 100 \\ &= 0,79\%\end{aligned}$$

2. Kontribusi Laba BUMD Bank Pasar Kota terhadap Pendapatan
Asli Daerah Tahun 2012-2018

- a. Kontribusi Laba BUMD Bank Pasar Kota terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{5.000.000.000,00}{300.696.062.096,22} \times 100 \\ &= 1,66\%\end{aligned}$$

- b. Kontribusi Laba BUMD Bank Pasar Kota terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{5.500.000.000,00}{360.698.350.030,13} \times 100 \\ &= 1,52\%\end{aligned}$$

- c. Kontribusi Laba BUMD Bank Pasar Kota terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{9.221.589.469,93}{394.646.889.455,86} \times 100 \\ &= 2,34\%\end{aligned}$$

- d. Kontribusi Laba BUMD Bank Pasar Kota terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{5.207.360.513,81}{397.547.326.194,00} \times 100 \\ &= 1,31\%\end{aligned}$$

- e. Kontribusi Laba BUMD Bank Pasar Kota terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{4.123.482.819,26}{483.379.398.037,47} \times 100 \\ &= 0,85\%\end{aligned}$$

- f. Kontribusi Laba BUMD Bank Pasar Kota terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{5.779.915.793,00}{613.208.672.046,62} \times 100 \\ &= 0,94\%\end{aligned}$$

- g. Kontribusi Laba BUMD Bank Pasar Kota terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{6.921.138.591,00}{678.365.881.579,00} \times 100 \\ &= 1,02\%\end{aligned}$$

3. Kontribusi Laba BUMD PDAM Way Rilau terhadap Pendapatan
Asli Daerah Tahun 2012-2018.

- a. Kontribusi Laba BUMD PDAM Way Rilau terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{0,00}{300.696.062.096,22} \times 100 \\ &= 0\%\end{aligned}$$

- b. Kontribusi Laba BUMD PDAM Way Rilau terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{250.000.000,00}{360.698.350.030,13} \times 100 \\ &= 0,07\%\end{aligned}$$


- c. Kontribusi Laba BUMD PDAM Way Rilau terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{250.000.000,00}{394.646.889.455,86} \times 100 \\ &= 0,06\%\end{aligned}$$

- d. Kontribusi Laba BUMD PDAM Way Rilau terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{500.000.000,00}{397.547.326.194,00} \times 100 \\ &= 0,12\%\end{aligned}$$

- e. Kontribusi Laba BUMD PDAM Way Rilau terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016.


$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{500.000.000,00}{483.379.398.037,47} \times 100 \\ &= 0,10\%\end{aligned}$$

- f. Kontribusi Laba BUMD PDAM Way Rilau terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{2.000.000.000,00}{613.208.672.046,62} \times 100 \\ &= 0,33\%\end{aligned}$$

- g. Kontribusi Laba BUMD PDAM Way Rilau terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{2.000.000.000,00}{678.365.881.579,00} \times 100 \\ &= 0,29\%\end{aligned}$$

4. Kontribusi Laba BUMD pembagian bunga kredit ekor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2018.

- a. Kontribusi Laba BUMD pembagian bunga kredit ekor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{0,00}{300.696.062.096,22} \times 100 \\ &= 0\%\end{aligned}$$

- b. Kontribusi Laba BUMD pembagian bunga kredit ekor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{68.508.701,00}{360.698.350.030,13} \times 100 \\ &= 0,02\%\end{aligned}$$

- c. Kontribusi Laba BUMD pembagian bunga kredit ekor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{86.953.423,00}{394.646.889.455,86} \times 100 \\ &= 0,22\%\end{aligned}$$

- d. Kontribusi Laba BUMD pembagian bunga kredit ekor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{65.914.437,00}{397.547.326.194,00} \times 100 \\ &= 0,02\%\end{aligned}$$

- e. Kontribusi Laba BUMD pembagian bunga kredit ekor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{0,00}{483.379.398.037,47} \times 100 \\ &= 0\%\end{aligned}$$

- f. Kontribusi Laba BUMD pembagian bunga kredit ekor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{0,00}{613.208.672.046,62} \times 100 \\ &= 0\%\end{aligned}$$

- g. Kontribusi Laba BUMD pembagian bunga kredit ekor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{0,00}{678.365.881.579,00} \times 100 \\ &= 0\%\end{aligned}$$

5. Kontribusi Laba BUMD BPR Syariah Kota Bandar Lampung terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2018.

a. Kontribusi Laba BUMD BPR Syariah Kota Bandar Lampung terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{0,00}{300.696.062.096,22} \times 100 \\ &= 0\%\end{aligned}$$

b. Kontribusi Laba BUMD BPR Syariah Kota Bandar Lampung terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{0,00}{360.698.350.030,13} \times 100 \\ &= 0\%\end{aligned}$$

c. Kontribusi Laba BUMD BPR Syariah Kota Bandar Lampung terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{0,00}{394.646.889.455,86} \times 100 \\ &= 0\%\end{aligned}$$

d. Kontribusi Laba BUMD BPR Syariah Kota Bandar Lampung terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{0,00}{397.547.326.194,00} \times 100 \\ &= 0\%\end{aligned}$$

- e. Kontribusi Laba BUMD BPR Syariah Kota Bandar Lampung terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{0,00}{483.379.398.037,47} \times 100 \\ &= 0\%\end{aligned}$$

- f. Kontribusi Laba BUMD BPR Syariah Kota Bandar Lampung terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{398.991.172,00}{613.208.672.046,62} \times 100 \\ &= 0,06\%\end{aligned}$$

- g. Kontribusi Laba BUMD BPR Syariah Kota Bandar Lampung terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{637.062.621,00}{678.365.881.579,00} \times 100 \\ &= 0,09\%\end{aligned}$$

Hasil dari semua penghitungan yang dilakukan diatas maka diperoleh nilai kontribusi laba dari semua BUMD yang ada diKota Bandar Lampung terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung dari tahun 2012-2018. Selain itu agar mempermudah membaca hasil penghitungan kontribusi laba dari semua BUMD yang ada diKota Bandar Lampung terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung dari tahun 2012-2018. penulis mensajikan tabel seperti berikut :

Tabel 6
Persentase Kontribusi Laba BUMD Yang Ada di Kota Bandar
Lampung Terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012-2018

(%)

Tahun	Bank Lampung	PD Bank Pasar Kota	PDAM Way Rilau	Pembagian bunga kredit ekor	PT. BPR Syariah Kota Bandar Lampung	Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung per tahun
2012	0,62%	1,66%	0%	0%	0%	300.696,062.096,22
2013	0,67%	1,52%	0,06%	0,01%	0%	360.698.350.030,13
2014	0,92%	2,33%	0,63%	0,22%	0%	394.646.889.455,86
2015	1,38%	1,30%	0,12%	0,16%	0%	397.547.326.194,00
2016	1,29%	0,85%	0,10%	0%	0%	483.379.398.037,47
2017	0,86%	0,94%	0,32%	0%	0,06%	613.208.672.046,62
2018	0,78%	1,02%	0,29%	0%	0,09%	678.365.881.579,00
Rata-rata	0,93%	1,37%	0,21%	0,05%	0,02%	

Dari pemaparan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa BUMD yang memiliki nilai kontribusi tertinggi adalah PD Bank Pasar Kota, dimana PD Bank Pasar Kota memiliki nilai rata-rata sebesar 1,37%. Sedangkan BUMD yang memiliki nilai kontribusi terendah adalah PT. BPR Syariah Kota Bandar Lampun, dimana PT. BPR Syariah Kota Bandar Lampung memiliki nilai rata-rata sebesar 0,02%.

Setelah diketahui nilai kontribusi pertahun dari semua BUMD terhadap pendapatan asli daerah yang ada di Kota Bandar Lampung selanjutnya

penulis melakukan perhitungan kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2018, sebagai berikut:

1. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{6.862.738.923,00}{300.696.062.096,22} \times 100 \\ &= 2,28\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan kontribusi laba BUMD diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 laba BUMD Kota Bandar Lampung memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 2,28%.

2. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{8.237.246.269,54}{360.698.350.030,13} \times 100 \\ &= 2,28\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan kontribusi laba BUMD diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 laba BUMD Kota Bandar Lampung memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 2,28%.

3. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{13.206.503.301,24}{394.646.889.455,86} \times 100 \\ &= 3,34\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan kontribusi laba BUMD diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 laba BUMD Kota Bandar Lampung memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 3,34%.

4. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{11.249.897.883,27}{397.547.326.194,00} \times 100 \\ &= 2,82\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan kontribusi laba BUMD diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 laba BUMD Kota Bandar Lampung memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 2,28%.

5. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{10.886.472.354,14}{483.379.398.037,47} \times 100 \\ &= 2,25\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan kontribusi laba BUMD diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 laba BUMD Kota Bandar Lampung memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 2,25%.

6. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{13.461.922.795,62}{613.208.672.046,62} \times 100 \\ &= 2,19\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan kontribusi laba BUMD diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 laba BUMD Kota Bandar Lampung memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 2,19%.

7. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi laba BUMD} &= \frac{14.894.667.167,54}{678.365.881.579,00} \times 100 \\ &= 2,19\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan kontribusi laba BUMD diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 laba BUMD Kota Bandar Lampung memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 2,19%.

Hasil dari semua penghitungan yang dilakukan diatas maka diperoleh nilai rata-rata kontribusi laba BUMD terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung dari tahun 2012-2018 sebesar 2,51%. Selain itu agar mempermudah membacahasil penghitungan kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung pada tahun 2012 sampai dengan 2018 penulis mensajikan tabel seperti berikut :

Tabel 7
Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Bandar Lampung tahun 2012-2018

(000 Rp)

No	Tahun	Total PAD	Laba BUMD	Kontribusi
1	2012	300.696,062,09	6.862.738,92	2,28%
2	2013	360.698.350,13	8.237.246,37	2,28%
3	2014	394.646.889,45	13.206.503,30	3,34%
4	2015	397.547.326,00	11.249.898,00	2,82%
5	2016	483.379.398,03	10.886.472,35	2,52%
6	2017	612.809.681,25	13.062.932,00	2,19%
7	2018	678.365.881,33	14.894.667,54	2,19%
Nilai rata-rata kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2012-2018				2,51%

Sumber : data yang diolah

Dari pemaparan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung pada tahun 2012 sebesar 2,28%. Selanjutnya pada tahun 2013 laba BUMD yang diterima mengalami kenaikan namun kontribusi tidak mengalami perubahan dimana kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli

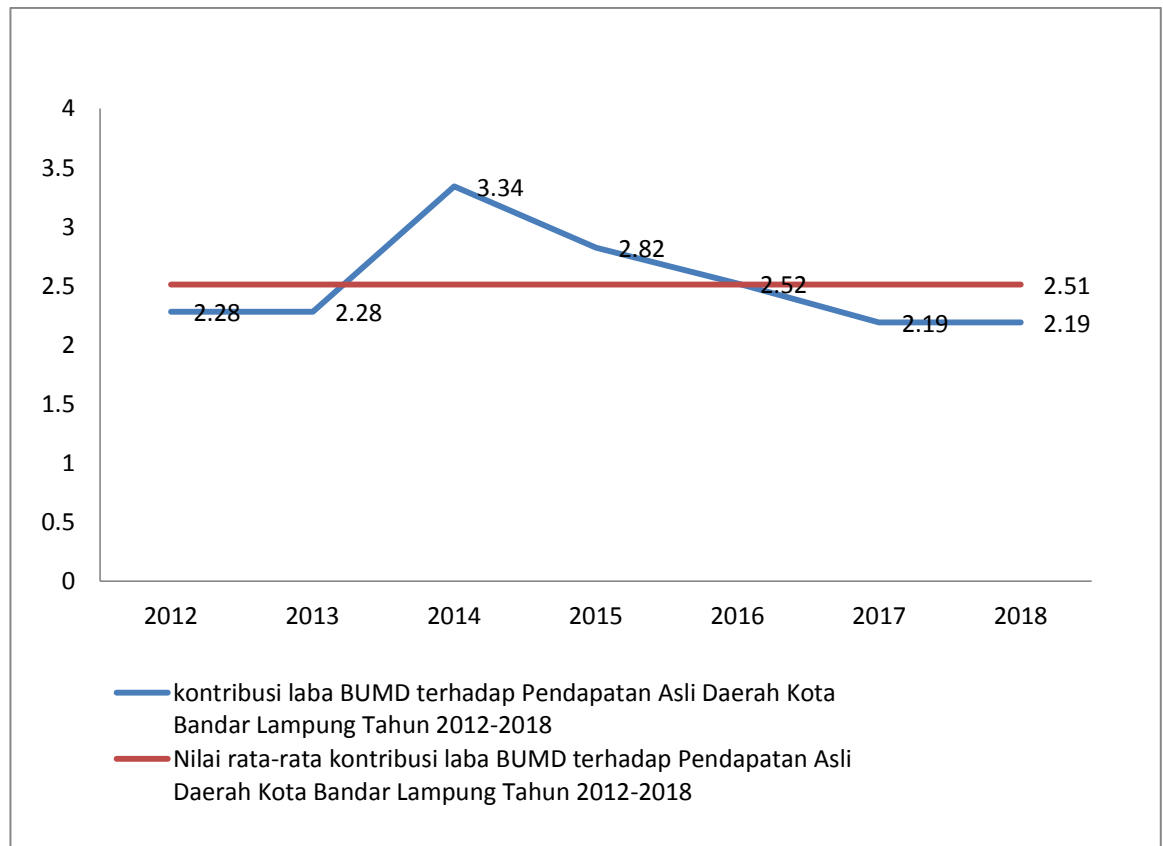
Daerah Kota Bandar Lampung tetap sebesar 2,28%. Pada tahun 2014 laba BUMD yang diterima terus mengalami kenaikan sehingga menyebabkan kontribusi laba BUMD mengalami peningkatan dimana kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung sebesar 3,34%.

Pada tahun 2015 laba BUMD mengalami penurunan sehingga kontribusi mengalami penurunan dimana kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung menjadi sebesar 2,82%. Selanjutnya pada tahun 2016 laba BUMD yang diterima masih mengalami penurunan sehingga kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung pun mengalami penurunan menjadi 2,52%.

Pada tahun 2017 laba BUMD mengalami peningkatan yang cukup besar namun hal ini tidak berpengaruh terhadap kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana kontribusi yang dihasilkan tetap mengalami penurunan menjadi sebesar 2,19%. Selanjutnya pada tahun 2018 laba BUMD masih terus mengalami peningkatan yang cukup besar namun kontribusi yang dihasilkan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung tetap sebesar 2,19%. Untuk lebih menjelaskan penurunan dan peningkatan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Tabel 8

Grafik Kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2018



Sumber : Data yang diolah

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa terdapat suatu peningkatan dan penurunan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bnadar Lampung yang bersifat tidak siqnifikan setiap tahunnya. Namun dari grafik diatas dapat juga diketahui bahwa kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung yang paling tinggi kontribusinya terdapat pada tahun 2014 sebesar 3,34%.

Pada grafik diatas juga mengindikasikan bahwa terjadinya peningkatan dan penurunan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan kinerja BUMD yang belum stabil dan BUMD yang ada di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya berorientasi pada laba.

Perolehan laba BUMD yang kecil diterima Kota Bandar Lampung ini menurut Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung salah satunya dikarenakan oleh belum jelasnya regulasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karena itu pemerintah diharapkan mampu memperjelas regulasi pengelolaan bumd yang ada agar memperkecil masalah yang dapat ditimbulkannya.¹⁴⁹ Namun meskipun BUMD yang ada memiliki permasalahan dan kontribusi BUMD di Kota Bandar Lampung saat ini masih belum besar tetapi keberadaan BUMD tetap diyakini dapat berpotensi memberikan kontribusi yang besar untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung karena dapat dilihat dari perolehan laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung masih terus mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya.

¹⁴⁹ “BPK:Perlu regulasi yang jelas dalam pengelolaan BUMD” (Online). Tersedia di <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/11/26/oh834u284-bpk-perlu-regulasi-jelas-dalam-pengelolaan-bumd> (23 juni 2019, pukul : 14:35 WIB)

B. Kebijakan Pemerintah dalam laba Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Islam merupakan agama yang selalu menuntut dalam segala hal dilakukan harus sesuai tuntunan yang ada didalam Al Qur'an dan Hadist yang dimana tetap mempertimbangkan kemaslahatan umat manusia. Sejalan dengan itu seperti yang kita ketahui bahwa Prof. Muhammad Al-Bahi telah merumuskan peran Negara dalam melindungi aset publik diantaranya sebagai berikut:

1. Membuat aturan penggarapan lahan milik Negara yang merupakan pokok kepemilikan umum rakyat.
2. Mengatur pemanfaatan aset publik oleh rakyat sambil membuat keputusan sistem dan aturan yang memudahkan hal tersebut dan mencegah perselisihan.
3. Tidak dibenarkan menetapkan kepenuhan aset publik untuk dirinya sendiri atau kerabat kroni, dan pendukung-pendukungnya, serta memberikan hak istimewa bagi mereka yang tidak bisa dinikmati orang lain.

ketiga pernyataan yang diungkapkan oleh Prof. Muhammad Al-Bahi jika ditarik kepermasalahan didalam penelitian ini dan disesuaikan dengan hasil wawancara maka dapat disimpulkan di kota Bandar Lampung telah menerapkan aturan penggarapan lahan. Seperti telah menerapkan suatu

kebijakan atau aturan dalam mengelolah Badan Usaha Milik Daerah harus dilakukan dengan cara efisien dan tidak menerapkan sifat boros.

Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung telah menerapkan kebijakan yang nyata untuk perusahaan PDAM Way Rilau, dimana perusahaan ini memiliki kewajiban untuk mengurangi pengaliran air bersih kepelanggannya jika debit air bersih yang ada disumbernya mengalami penurunan. Hal ini bertujuan agar menjaga pasokan air bersih agar tetap terjaga dan agar pihak konsumen dapat menggunakan air bersih secara efisien.

Selain itu kebijakan yang telah diterapkan pemerintah ini sejalan dengan yang ada didalam Al Qur'an seperti dalam ayat berikut:

﴿كَفُورًا لِّرَبِّهِ ۚ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِخْوَانًا نُّوًا الْمُبْدِرِينَ ۚ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”
(Qs.Al Isra'(17):27)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah melarang dalam segala kegiatan tidak lah harus dilakukan dengan sifat pemborosan, karena sifat pemborosan merupakan perbuatan syaitan dimana sifat tersebut akan memiliki dampak negatif bagi orang itu sendiri maupun orang banyak.

Kebijakan lain yang di terapkan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung adalah suatu kebijakan pengawasan. Kebijakan pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung adalah pengawasan langsung oleh kepala daerah selaku pemegang otoritas tertinggi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah melakukan pengawasan dalam waktu waktu tertentu. Dimana pengawasan pemerintah seperti pengawasan kinerja BUMD yang telah ada. BUMD yang telah berdiri diwajibkan dalam hal pengelolaan harus mengandung unsur tata kelola perusahaan yang baik. Baik dari pengelolaan dalam perusahaan itu tersendiri maupun kinerja perusahaan terhadap masyarakat banyak, selain itu pemerintah daerah sangat mewajibkan BUMD yang telah berdiri harus memperhatikan lingkungan sekitar jangan sampai menyebabkan hal yang tidak baik seperti dalam hal pengelolaan limbah ataupun lainnya harus dilakukan sesuai peraturan yang telah ada.

Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung ini sejalan dengan yang ada di dalam Al Quran, seperti dalam ayat berikut:



لَمَلِكَةٍ عَلَيْهِمَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارٌ وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُودًا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَّقُونَ
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعِصُونَ لَا شِدَادٌ غَلَا ظُم

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Qs. At Tahrim(66):6)

Ayat diatas jika ditarik kepermasalahan penelitian maka pemerintah diharapkan mampu memelihara BUMD yang ada dengan cara melakukan sebuah pengawasan agar tidak melakukan tindakan yang merugikan bagi masyarakat banyak dan maupun merugikan perusahaan itu sendiri. Karena

BUMD yang didirikan memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak adalah dengan menerapkan kebijakan perencanaan yang matang, dimana dari hasil wawancara yang telah dilakukan maka penelitian ini mendapatkan info bahwa pemerintah daerah Kota Bandar Lampung telah menerapkan kebijakan perencanaan, perencanaan yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu seperti pemerintah setiap tahunnya melakukan penentuan target pertahunnya yang didasarkan pada potensi yang ada dengan melihat realisasi yang dicapai pada tahun sebelumnya serta menambahkan presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai. Hal inilah yang menjadi acuan pemerintah untuk menetapkan target penerimaan laba BUMD pertahunnya agar tingkat perolehan sektor ini memberikan sumbangan yang sesuai dan upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat terealisasi.

Kebijakan perencanaan seperti yang diterapkan pemerintah kota Bandar Lampung pun sejalan dengan yang ada di Al Qur'an, seperti dalam ayat berikut:

بِئْرَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا الْغَدِقْدَمَ مَا نَفْسُ وَلْتَنْظُرَ اللَّهُ اتَّقُوا الَّذِينَ يَتَأْتُوا

تَعْمَلُونَ بِمَا خ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al Hasyr(59):18)

Pernyataan lain yang dikemukakan oleh Prof. Muhammad Al-Bahi adalah tidak dibenarkan menetapkan kepenuhan aset publik untuk dirinya sendiri atau kerabat kroni, dan lainlainnya. Dalam praktiknya langsung bentuk suatu BUMD yang dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang RI terbagi menjadi dua yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

Perusahaan umum daerah adalah suatu BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas sahamnya. Sedangkan perusahaan perseroan daerah adalah sebuah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Terbagi BUMD menjadi dua bentuk seperti itu bertujuan agar suatu BUMD tidak dikuasai oleh oknum ataupun kelompok tertentu dan agar tetap memiliki tujuan utama pendirian BUMD di Kota Bandar Lampung adalah untuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerahnya, yang dimana pendapatan asli daerah ini digunakan untuk mewujudkan tujuan mensejahterahkan masyarakat.

Meskipun dalam praktiknya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kota Bandar Lampung telah beberapa yang sesuai dengan ajaran islam namun tidak semua dalam praktiknya sesuai dengan ajaran Islam. Seperti contoh disalah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor BUMD, yaitu BUMD yang bergerak pada bidang perbankan masih menerapkan system bunga padahal di dalam Islam telah secara jelas melarang kegiatan riba. Seperti dalam ayat berikut:

مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَايَا كُلُّونَ الَّذِينَ
 فَمَنْ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسْ
 فَأُولَئِكَ عَادُوا إِلَى اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِّنْ مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُ

Artinya:

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Qs. Al Baqaraah(2):275)

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai umat muslim dilarang melakukan riba karena riba merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama karena akan menyebabkan banyak hal buruk. Oleh karena itu pemerintah diharapkan mampu menerapkan kebijakan dalam hal pengoptimalan laba bumd yang jauh dari unsur-unsur yang dilarang oleh islam misalkan memajukan sistem perbankan yang berbasis syariah agar upaya mencapai kesejahteraan dapat tecipta dengan adil, merata dan sesuai dengan ajaran islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis kontribusi laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi islam yang telah dilakukan, maka telah didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi laba BUMD terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung pada tahun 2012-2018 berdasarkan hasil penelitian belum berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah, hal ini disebabkan karena kontribusi laba BUMD terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya masih terbilang terendah dari sumber penerimaan pendapatan asli daerah lainnya, yang dimana kontribusi terbesar terjadi ditahun 2014 sebesar 3,34% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 dan 2018 yang dimana sebesar 2,19%. Sedangkan jika dilihat dari nilai rata-rata kontribusi laba BUMD pertahunnya maka diperoleh nilai kontribusi laba BUMD sebesar 2,51%. Meskipun laba BUMD masih belum berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampungtetapi masih memiliki potensi yang besar, hal ini disebabkan karena nilai penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor BUMD pertahunnya masih mengalami peningkatan.
2. Kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam mengoptimalkan laba Badan Usaha Milik Daerah terhadapPendapatan Asli Daerah telah mulai sesuai

dengan ajaran islam seperti telah menerapkan sifat efisien dalam pengoptimalan sumber daya ,tidak menerapkan sifat boros, melakukan perencanaan dan melakukan pengawasan. Meskipun telah menerapkan sesuai ajaran islam tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran islam, hal ini karena dalam pengoptimalan laba bumd disalah satu BUMD masih menerapkan sistem bunga (riba) yang dimana riba merupakan hal yang dilarang dalam ajaran islam.

B. Saran

Adapun dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran yang sehubungan dengan kontribusi laba BUMD terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah khususnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan adanya hasil penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan adanya sebuah upaya atau kebijakan yang dilakukan secara lebih maksimal dalam mengelola keberadaan BUMD agar kontribusinya dapat meningkat sehingga pendapatan asli daerah yang diterima jauh lebih besar dimasa yang akan datang. Selain itu pemerintahan daerah diharapkan dapat menambah usaha yang berorientasi terhadap laba sehingga dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan laba BUMD.
2. Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya, dengan adanya penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan refensi untuk kegiatan mengajar ataupun untuk penelitian selanjutnya. Dikarenakan

dalam penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya dari 2012 sampai 2018, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya mampu lebih mengembangkannya sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Andri Devita, Arman Delis, dan Junaidi, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*, Jurnal Perpektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol.2, No.2 tahun 2014
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999
- Annisa, Jihan, “*Peranan Badan Usaha Milik Daerah PT. Tanjung Pinang Makmur bersama Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang Kep. Riau. 2017
- Bank Syariah Bandar Lampung: PT. BPRS Bandar Lampung” (Online), tersedia di : <http://Banksyariahbandarlampung.co.id/sejarah/> (6 April 2019, PUKUL 17:24 WIB)
- Bank Syariah Bandar Lampung, *Sejarah BPRS Kota Bandar Lampung*, diakses dari banksyariahbandarlampung.co.id pada 18 Desember 2018 pukul 22:25 WIB.
- Bapak Andi Budiman, pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wawancara dengan penulis pada tanggal 15 April 2019
- Dahlan, Ahmad, *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4, No.1 Tahun 2010
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : 2009
- Dokumentasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 15 April 2019
- Fitra, Halkadri, *Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Untuk Mengoptimalkan Manajemen Pendapatan Daerah*. Jurnal WRA, Vol 3 No 2 Tahun 2015
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat, 2012

Halim, Abdul, *Manajemen keuangan daerah*, Yogyakarta: Bunga Rampat, 2014

Halim, Abdul, *Manajemen keuangan daerah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>, di akses pada tanggal 24 februari 2019 pukul

Isa, Muzakar, Abu Bakar Akbar, "Pengukuran Efisiensi BUMD: Studi Empirik PDAM di Eks-Karisidenan Surakarta", Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol.16 No.1, Tahun 2012

Kartono, Kartini, *pengantar metodologi riset sosial*, Bandung: Mundur Maju, 2012

Kementrian Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2015.

Kountur, Rony, *metode penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005

Kusumayant, Ni Putu Ari i, Nyoman Triaryati, *Analisis Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten di Bali di Luar Wilayah Sarbagita*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7, No. 8, tahun 2018

Lampung.tribunnews.com, diakses pada tanggal 9 Januari 2019 pukul 13:28

Lativa, Ainun, "Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung". Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

Mahmud, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2010

Moh. Nazir, *metode penelitian*, Bogor: Grialia Indonesia, 2009

Muhtarom, Abid, *Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan periode tahun 2010-2015*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. XIII, No.1, tahun 2015.

Muryanto, Yudho Taruno, Djuwityastuti, *Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate*

Governance, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. 3, No. 1 Tahun 2014.

Nurul Huda,dkk, *Keuangan publik islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*nya, Jakarta: Kencana, 2012

PDAM Way Rilau, diakses dari www.pdamwayrilau.com, tanggal 18 Desember 2018 pukul 22:40

Putra, Bayu Pratama, *Analisis Kontribusi Laba Perusahaan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritime Raja Ali Haji. Tanjung Pinang Kep. Riau, 2016

Putra, Windhu, *Tata kelola ekonomi keuangan daerah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

P3EI. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Rasiam, *Kebijaka Fiskal Dalam Islam*, Jurnal Khatulistiwa, Vol 4 No. 1, Tahun 2014

Ridlo, Ali, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 2 Tahun 2013

Sari, Ayu Mutia, *Analisis Kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Dalam Memberikan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2001-2006*, Skripsi Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2007

Sejarah Bank Lampung(Online), tersedia di :
<https://banklampung.co.id/profil/sejarah> 23 Februari 2019,pukul : 20:40 WIB

Sjafrizal, *ekonomi wilayah dan perkotaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Sugiyono, *Metode penelitian manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016

Suprpto, *Metode Ramalan Kuantitatif*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2010

Syahatah, Husain Husain, *Perlindungan aset publik dalam perspektif hukum islam*, Jakarta: Amzah, 2009

Undang-undang No. 25 Tahun 2000

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Undang-Undang RI No.9 Tahun 2015

Usman, Husaini, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008

Widjaja haw, *Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001.

Yani, Tengku Ahmad, *Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No. 56, tahun 2012

Zainal, Veithzal Rivai, Nurul Huda, Sri Vandayuli Riorini, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana peran pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung dalam rangka mendukung otonomi daerah?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat memaksimalkan sektor pendapatan asli daerah, Khususnya sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang setiap tahunnya mengalami ketertinggalan dari sektor lainnya?
3. Bagaimana peranan laba BUMD dalam upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung?
4. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kontribusi laba BUMD di Kota Bandar Lampung?
5. Kebijakan-kebijakan seperti apa yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan laba BUMD?
6. Apa sajakah dasar dalam penetapan target laba BUMD setiap tahunnya?
7. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam memperoleh laba BUMD?
8. Bagaimana peran pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatur dan mengawasi BUMD yang berdiri?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Suasana salah satu ruangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Wawancara dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Tampak depan ruangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung di lantai 3 gedung satu atap



Tampak luar Gedung satu Atap

Laporan tahunan Badan Usaha Milik Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
LATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012

	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)
retribusi selama 20 tahun sekaligus masa berlaku HGB. Penetapan dan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas izin perpanjangan HGB di atas HPL yang diterima sekaligus untuk 20 tahun tersebut, tidak memperhatikan nilai waktu dari uang (net present value) dan menghilangkan potensi pendapatan asli daerah di masa yang akan datang.		
- Retribusi Terminal		
- Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.563.786.000,00	1.104.260.000,00
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	396.775.000,00	13.531.000,00
- Retribusi Rumah Potong Hewan	300.006.000,00	298.930.000,00
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	16.808.645.910,00	300.017.500,00
- Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	14.901.345.475,00	13.643.377.312,00
- Retribusi Izin Trayek	101.745.000,00	8.950.327.763,00
- Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	101.615.000,00
- Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	0,00	6.920.000,00
- Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan	0,00	67.950.000,00
- Retribusi Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Persetujuan Prinsip	0,00	33.585.000,00
- Retribusi Perdagangan Luar Negeri	0,00	0,00
- Retribusi Tanda Daftar Industri	0,00	1.400.000,00
- Retribusi Tanda Daftar Gudang	0,00	2.350.000,00
- Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	0,00	1.400.000,00
- Retribusi Izin Usaha Kepariwisata	0,00	25.104.063,00
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	25.600.000,00	8.607.500,00
- Retribusi Izin Usaha Perikanan	31.270.000,00	0,00
5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.862.738.923,00	5.631.089.632,00
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2012 dan 2011 berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dengan rincian sebagai berikut:		
- Bank Lampung	1.862.738.923,00	1.631.089.632,00
- PD Bank Pasar Kota	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00
- PDAM	0,00	0,00
5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.144.717.721,23	6.198.579.220,88
Realisasi Tahun Anggaran 2012 & 2011 sebagai berikut :		
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	274.888.750,00	166.203.500,00
- Hasil Penjualan Aset Tetap	274.888.750,00	166.203.500,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2011-2012.

AUTOMATIC

PENDAH KOTA BANDAR LAMPUNG
LAPORAN KEUANGAN
 Berakhir tanggal 31 Desember 2014

	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	552.450.000,00	435.350.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	290.100.000,00	260.382.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	17.600.131.556,00	18.322.279.604,52
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	8.965.905.875,00	15.535.757.251,06
Retribusi Izin Trayek	114.618.000,00	119.456.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	20.105.000,00	23.080.000,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	29.000.000,00	48.100.000,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	2.070.000,00	1.210.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	586.962.600,00	264.164.336,74
Retribusi Tempat Pelelangan	69.200.000,00	0,00
Retribusi Jasa Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan	56.100.000,00	0,00
	13.206.503.301,24	8.237.246.269,54
1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2014 dan 2013 berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dengan rincian sebagai berikut:		
- PT Bank Lampung	3.647.960.408,31	2.418.737.568,54
- PD Bank Pasar Kota	9.221.589.469,93	5.500.000.000,00
- PDAM	250.000.000,00	250.000.000,00
- Pembagian Bunga Kredit Ekor	86.953.423,00	68.508.701,00
	89.351.963.991,40	59.158.057.632,84
1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2014 dan 2013 sebagai berikut :		
a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.000.700.760,00	892.177.390,00
	1.000.700.760,00	892.177.390,00
	1.000.700.760,00	5.370.414.554,67

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2013-2014.

	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
5.1.1.1.2. Retribusi Daerah		
Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 dan 2014 sebagai berikut :	46.682.837.194,00	45.920.496.941,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	6.574.033.000,00	5.954.923.000,00
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.128.277.000,00	4.925.028.400,00
- Retribusi Pelayanan Pasar	1.789.964.000,00	1.732.852.000,00
- Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	1.355.459.230,00	1.517.234.770,00
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	180.671.000,00	180.390.000,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.638.673.700,00	1.559.779.240,00
- Retribusi Terminal	1.836.105.000,00	1.783.846.500,00
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	564.350.000,00	552.450.000,00
- Retribusi Rumah Potong Hewan	290.049.000,00	290.100.000,00
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	12.865.766.139,00	17.800.131.556,00
- Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	12.168.381.125,00	8.965.905.875,00
- Retribusi Izin Trayek	85.662.000,00	114.618.000,00
- Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.460.000,00	20.105.000,00
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	26.100.000,00	29.000.000,00
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	2.820.000,00	2.070.000,00
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.278.792.000,00	586.962.600,00
- Retribusi Tempat Pelelangan	73.000.000,00	69.200.000,00
- Retribusi Jasa Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan	40.274.000,00	56.100.000,00
5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.249.897.883,27	13.206.503.301,24
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2015 dan 2014 berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dengan rincian sebagai berikut :		
- PT Bank Lampung	5.476.622.932,46	3.647.960.408,31
- PD Bank Pasar Kota	5.207.360.513,81	9.221.589.469,93
- PDAM	500.000.000,00	250.000.000,00
- Pembagian Bunga Kredit Ekor	65.914.437,00	86.953.423,00
5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.159.929.433,12	89.351.963.991,40

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2014-2015.

KOTA BANDAR LAMPUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%	Realisasi TA 2016 (Rp)
- Retribusi Terminal	2.399.000.000,00	1.279.968.000,00	53,35%	1.515.636.000,00
- Retribusi Rumah Potong Hewan	290.000.000,00	290.038.000,00	100,01%	290.003.000,00
- Retribusi Jasa Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan	138.000.000,00	112.059.715,00	81,20%	65.500.000,00
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	54.710.114.300,00	7.819.109.253,00	14,29%	16.369.370.638,00
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00%	8.000.000,00
- Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian	2.218.487.000,00	2.218.487.000,00	100,00%	14.588.437.106,00
- Retribusi Izin Trayek	146.107.500,00	7.794.000,00	5,33%	45.084.000,00
3.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.938.000.000,00	13.461.922.795,62	104,05%	10.886.472.354,14
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2017 dan 2016 berasal dari				
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dengan rincian sebagai berikut :				
- PT BPD Lampung	5.938.000.000,00	5.283.015.830,62	89,90%	6.262.989.534,88
- PD BPR Pasar	4.500.000.000,00	5.779.915.793,00	128,44%	4.123.482.819,26
- PDAM Way Rilau	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	80,00%	500.000.000,00
- PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung	0,00	398.991.172,00	-	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	348.085.603.800,00	197.725.452.250,52	56,80%	98.172.277.364,71
Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2017 dan 2016 sebagai berikut :				

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2016-2017.